



mediakebijakan

GERAK CEPAT

BINA

INOVASI DAERAH

GERAK CEPAT BINA INOVASI DAERAH

Tabik.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat dengan turun langsung ke daerah setelah evaluasi Innovative Government Award (IGA) 2021. Enam titik wilayah menjadi tempat pembinaan dan berkumpulnya pemerintah daerah yang mendapat predikat kurang inovatif atau tidak dapat dinilai. Upaya ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan langsung Kepala BSKDN Kemendagri untuk melakukan pembinaan tersebut.

Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, kami berupaya menyajikan ragam program pembinaan yang telah dilakukan BSKDN Kemendagri dalam melecutkan daerah untuk berinovasi. Tak hanya itu, dalam rubrik lebih dekat, kami berkesempatan berdiskusi dengan

Direktur ISTP Universitas Indonesia, Ahmad Gamal guna mengulas sepak terjangnya dalam dunia inovasi. Berbagai informasi menarik dan penting lainnya juga kami hadirkan lewat rubrik opini, cerpen, dan resensi film.



Kurniasih

Sekretaris Badan Litbang Kemendagri



BINA PRAJA PRESS:

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbang.kemendagri.go.id
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

media kebijakan

SUMBER INFORMASI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

PELINDUNG

MENTERI DALAM NEGERI

PENANGGUNG JAWAB

EKO PRASETYANTO

PEMIMPIN REDAKSI

KURNIASIH

REDAKTUR PELAKSANA

AJI NUR CAHYO

REDAKTUR

MATHEOS TAN

AKBAR ALI

HERU TJAHYONO

MOHAMMAD NOVAL

PENYUNTING

FRISCA NATALIA

PELIPUTAN

ROBI KURNIAWAN

PENATA LETAK

FAJAR HARAMUKTI

ILUSTRASI COVER

FAJAR HARAMUKTI

Diterbitkan oleh:



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.go.id

Frekuensi terbitan : 2 bulanan

Nomor ISSN : xxxx-xxxx

Keterangan : Kategori sosial

jendela BSKDN



Kemendagri Sampaikan Pentingnya
Beragam Indeks Pengukuran
untuk Tingkatkan Kinerja Pemda



lensa matra



28



jendela BSKDN

aktivitas

BSKDN Kemendagri Gelar Diskusi untuk Petakan beragam Solusi
Persoalan Politik dan Pemerintahan Umum

6



BSKDN Kemendagri
minta Pemda gencar Raih
Predikat WTP

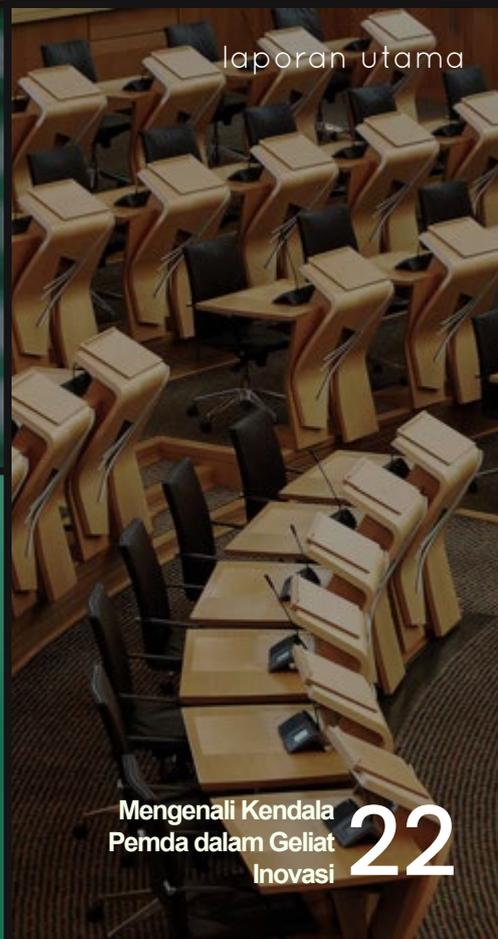
10



aktivitas

Kemendagri: Tertib Arsip akan Memperkecil
Kesalahan Kebijakan

14



laporan utama

laporan utama

Gerak Cepat Bina Inovasi Daerah

18

Mengenali Kendala
Pemda dalam Geliat
Inovasi

22



lebih dekat

Dampak Inovasi Daerah,
Perlu Diukur dan Dipertimbangkan

34



resensi film

Father Tsu

48



KEMENDAGRI SAMPAIKAN PENTINGNYA BERAGAM INDEKS PENGUKURAN UNTUK TINGKATKAN KINERJA PEMDA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah sangat penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kesatuan pemahaman pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada ketiga indeks tersebut akan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pengukuran.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Eko Prasetyanto dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah di Bali, Kamis, 19 Mei 2022. “Setiap (indeks) pengukuran memerlukan pemahaman kita bersama. Uji coba di berbagai tempat, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah dilakukan un-

tuk mematangkan indeks tersebut. Ini penting dilakukan untuk kemajuan kita bersama,” ujar Kepala BSKDN.

Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui ketiga indeks tersebut, lanjut Kepala BSKDN, juga dilakukan agar pemerintah daerah dapat konsisten di tengah perubahan zaman yang demikian cepat. “Kita sadari, perubahannya begitu cepat, atau sering disebut dengan VUCA; perubahan yang sangat cepat, tidak menentu, kompleks, dan tidak jelas. Siapa yang menyangka dua tahun lalu akan ada pandemi Covid-19? Tidak ada,” ungkapnya lagi.

Sebab itu, ia mengharapkan, dengan variabel dan indikator yang digunakan dalam ketiga indeks tersebut dapat menjadi pegangan untuk terus melakukan peningkatan kinerja. “Hal ini memang tidak mudah dan menjadi tantangan tersendiri. Namun kita perlu selalu optimis,” tekan Kepala



Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasteyanto membuka acara *Forum Group Discussion (FGD)* bertajuk Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah di Bali, Kamis, 19 Mei 2022.

BSKDN.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Ia mengatakan, ketiga indeks tersebut penting dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. “Saya percaya pengukuran ini dimaksudkan Kemendagri, selain merupakan amanat dari undang-undang tentang pemerintah daerah, tetapi ini juga pasti sesuatu yang penting dalam rangka mendorong tugas pemerintah di daerah dalam melakukan perbaikan di berbagai bidang,” ucapnya.

Dengan melihat kepentingan tersebut, Indra pun mengharapkan para peserta yang hadir dalam diskusi dapat berpartisipasi sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh. “Agar ada pemahaman yang sama antara kita, sehingga selanjutnya dapat bekerja kerangka yang sama pula,” lanjutnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan juga BSKDN yang telah mengadakan kegiatan tersebut di daerah mereka. “Kami dari Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten serta kota se-provinsi Bali menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Eko dan segenap penyelenggara. Semoga FGD ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, FGD ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bali, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali. Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, dan Kepala Pusat Litbang Kemendagri tampil sebagai pemateri dalam FGD.

• Robi



BSKDN Kemendagri Gelar Diskusi

untuk Petakan Beragam Solusi Persoalan Politik dan Pemerintahan Umum

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyatakan komitmennya untuk memetakan, mengkaji, hingga menawarkan rekomendasi atas beragam persoalan politik dan pemerintahan umum yang tengah di hadapi, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, dalam diskusi aktual bertema Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum, di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juni 2022.

“Pertemuan kita pada siang hari ini sangat penting dalam rangka membahas urusan politik dan masalah pemerintahan umum. Dari diskusi aktual ini diharapkan akan terpetakan masalah-masalah juga kendala-kendala, untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Oleh sebab itu, kami

berharap partisipasi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pemikirannya,” ucap Eko guna memulai diskusi aktual.

Salah satu soal yang menjadi perhatiannya dalam politik adalah persiapan pemilu mendatang. Ia mengharapkan diskusi aktual ini turut mempelajari dan menindaklanjuti evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“Kita tidak dapat mengabaikan evaluasi. Ada beberapa kendala yang menjadi perhatian kita, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara), surat suara, dan petugasnya. Ini perlu menjadi perhatian dan masukan dari kita bersama, dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus mencegah persoalan yang mungkin akan terjadi,” ucapnya lagi.

Meskipun begitu, ia tetap optimis berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan dengan baik. “Kalau kita



Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, membuka acara dalam diskusi aktual bertema Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum, di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juni 2022.

flashback ke belakang, pada tahun 2019 pada waktu pelaksanaan pemilu, banyak yang pesimis. Namun setelah terjadi, banyak orang yang memuji kita. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus ribuan kandidat bisa terlaksana dengan baik,” lanjutnya.

Sebab itu, Eko mengingatkan, agar kinerja baik dapat diraih kembali diperlukan kerja sama antar berbagai pihak. “Dalam diskusi ini perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang turut serta memfasilitasi. Sehingga kita dapat saling sharing untuk apa yang akan kita lakukan ke depan,” ucapnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, juga turut mengapresiasi diskusi aktual ini. Pihaknya berharap, dengan diadakan diskusi akan menambah pengetahuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. “Kita

memerlukan langkah-langkah konkret untuk dilakukan agar pemerintahan pusat dan daerah dalam kewenangannya masing-masing dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan,” ucap Akmal.

Sebagai tambahan informasi, diskusi ini adalah bagian dari kegiatan pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Selain Kepala BSKDN dan Penjabat Gubernur, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum BSKDN, Deputi V Bidang Koordinator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, dan Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir sebagai pemantik diskusi.

• **Robi**

NOMI DAERA

ab. Bekasi

BSKDN KEMENDAGRI INGATKAN PERAN PENTING PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar diskusi terpumpun bersama seluruh persatuan perempuan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 28 Juni 2022. Diskusi tersebut mengangkat tema Penguatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Topik ini diangkat BSKDN Kemendagri karena pesan strategis yang dapat mereka lakukan dalam perumusan kebijakan.

“Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semata-mata hanya sekadar pelengkap saja, melainkan harus berperan aktif dalam pengambilan kepu-

tusan yang menyangkut kepentingan dan kesinambungan negara dan bangsa,” ungkap Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kurniasih, dalam sambutannya.

Sejauh ini keterlibatan perempuan dalam kebijakan, menurut Kurniasih, sudah semakin baik, namun perlu untuk lebih ditingkatkan. Dengan merujuk pada Indeks Pembangunan *Gender* (IPG), ia mengatakan perempuan tidak perlu rendah diri dibandingkan laki-laki.

“Berdasarkan sumber dari Kementerian Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2019, IPG Indonesia telah mencapai angka 91,07 persen. Ini mening-



Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih memberikan sambutan pada acara Diskusi Aktual dengan tema Penguatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Selasa 28 Juni 2022 di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

kat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat secara keseluruhan, IPG di Indonesia mengalami trend yang terus meningkat. Hal ini amat menggembirakan dan akan berdampak baik pemerintahan Indonesia,” ungkapnya lagi.

Hal yang sama juga diucapkan Kepala Pusat Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, Akbar Ali. Ia mengatakan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, sosial, maupun juga soal pengambilan kebijakan. Sebab itu melibatkan perempuan adalah keniscayaan dalam pembangunan.

“Sebab itu dalam diskusi ini, kami mengharapkan adanya masukan dan saran dari para peserta untuk meningkatkan

peran perempuan di era otonomi daerah ini agar pembangunan dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama-sama,” ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, diskusi ini menghadirkan beberapa pemateri, seperti Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Gabungan Organisasi Wanita, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, dan Ketua Alisa Khadijah ICMI. Diskusi berlangsung semarak dengan dihadiri para ibu PKK dari berbagai desa dan kecamatan se-kabupaten Bekasi.

• Robi

BSKDN KEMENDAGRI MINTA PEMDA *Gencar Raih Predikat WTP*

Kepala Badan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto menyebutkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu dimensi penting dalam tata kelola keuangan pemerintah. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK menjadi nilai penting dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mesti dicapai pemerintah daerah.

“Apakah Sudah WTP?” tanya Eko pada pemerintah daerah yang hadir dalam bimbingan teknis (Bimtek) IPKD di Bali, Jumat, 10 Juni 2022. Ia ingin memastikan pemerintah daerah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah

mereka hingga mendapatkan opini baik tersebut dari BPK.

“Mari Bapak dan Ibu, ini (mendapatkan opini BPK) kita ikuti. Kita kerja secara objektif. Sehingga kita benar-benar mengetahui kondisi daerah kita. Apakah kondisi keuangan kita sudah baik, atau masih memerlukan perbaikan, atau masih sangat memerlukan perbaikan,” tambah Eko.

Ia pun melanjutkan opini BPK tersebut adalah salah satu dimensi dari lima dimensi lain dalam pengukuran IPKD yang disusun BSKDN. Lima yang lain adalah kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuan-



gan daerah, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah.

Dengan memaksimalkan kinerja dalam masing-masing dimensi, pemerintah daerah akan mendapatkan hasil yang baik pula dalam IPKD. Demikian, kata Eko, penting dalam upaya pembangunan daerah dan bangsa secara umum. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju,” ungkapnya.

Para peserta yang hadir pun mengamini pentingnya masukan BSKDN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRI-

DA) Pemerintah Provinsi Bali, I Made Gunaja mengatakan Bimtek yang diadakan tersebut akan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan yang baik.

“Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” ucapnya mewakili Pemerintah Provinsi Bali.

• **Robi**



Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasteyanto memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemerintah provinsi se-Jawa dan Kalimantan, Selasa 26 April 2022 di Yogyakarta.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemerintah provinsi se-Jawa dan Kalimantan, hari ini, 26 April 2022 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, dalam sambutannya mengajak para peserta untuk memeriksa kembali kinerja pengelolaan keuangan daerah mereka. “Mari kita nilai tempat kita, Bapak dan Ibu, apakah sudah ada transparansi belum? Sudah akuntabel belum?” ungkap Eko.

Di hadapan perwakilan pemerintah provinsi itu pula, Eko mengingatkan untuk terus memperhatikan penyerapan anggaran. “Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian,

selalu mengatakan kepada kita di berbagai kesempatan, jangan sampai semua penyerapan anggaran itu di akhir tahun. Bagaimana situasinya di tempat kita? Penyerapannya di akhir tahun atau tidak?” tanya Eko.

Penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara umum, katanya lagi, akan memengaruhi ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebab itu, Eko mengatakan, pemerintah daerah harus benar-benar efektif dalam menyusun agenda pengelolaan keuangannya. “Pengalaman akibat pandemi Covid-19 kemarin adalah pengalaman yang berharga buat kita bersama. Dari 34 Provinsi, yang pertumbuhannya positif hanya tiga provinsi. Selebihnya negatif,” terang Eko.

Eko pun mengharapkan agar ada mekanisme pembelajaran, agar kejadian serupa dapat diantisipasi. Bimtek yang diadakan saat ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk hal itu. “Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang diskusi.



Guna Perkuat Kinerja Pemda, Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbagai hal tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kita diskusikan untuk kemajuan kita bersama,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Heru Tjahyono mengatakan, Bimtek ini diharapkan dapat menyatukan cara pandang tentang pengelolaan keuangan daerah. “Maksud kegiatan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kebijakan dan teknis pengukuran pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ucap Heru.

Ia pun mengharapkan para peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. “Semoga Bimtek ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga para peserta dapat kembali ke daerahnya masing-masing dengan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Yogyakarta, Beny Suharsono, pun mengucapkan terima kasih telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Bimtek. “Kami bersyukur, berterima kasih, Pak Kaban (Kepala BSKDN) yang telah memilih audiensi kegiatan di Yogya. Semoga acara ini berjalan lancar. Bapak dan Ibu pun selanjutnya dapat eksplorasi kuliner dan berbelanja di UMKM Kota Yogyakarta setelah acara ini,” ucap Benny disambut tepuk tangan hadirin.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Bimtek ini diagen-
dakan berlangsung hingga 27 April 2022. Para peserta terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Litbang Daerah Provinsi, dan Dinas Kominfo Provinsi se-Jawa dan Kalimantan.

• **Robi**



KEMENDAGRI:

Tertib Arsip akan Memperkecil Kesalahan Kebijakan

Dalam pengambilan kebijakan, keberadaan arsip amat penting. Dengan arsip, pemerintah dapat mempelajari kebijakan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pengetahuan yang didapat dari arsip selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan ke depan dengan optimal.

“Arsip itu sangat penting. Karena dengan arsip, kita dapat melihat apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan,” ucap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Eko Prasetyanto saat membuka Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Tahun 2022, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin, 28 Maret 2022.

Pengelolaan arsip yang baik, lanjut Eko, akan memban-

tu pemerintah mengambil keputusan yang tepat didasari dengan pengalaman dan data-data terdahulu. “Dalam pengambilan kebijakan, butuh kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Dan Salah satu yang dapat menolong kita dalam memperkecil kesalahan dalam pengambilan kebijakan adalah dengan arsip,” tambahnya.

Begitu pentingnya peran arsip dalam pengambilan kebijakan, Eko menganjurkan pemerintah daerah, di setiap tingkatan, untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip daerah “Bahkan, di desa pun perlu dilatih mengenai kearsipan,” tekan Eko.

Ketidaktertiban pengelolaan arsip dapat mempersulit pemerintah untuk menuntaskan persoalan yang terjadi kemudian hari. Eko mencontohkan perihal pemekaran. “Ketika ada pemekaran wilayah, banyak persoalan yang



Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Eko Prasetyanto saat membuka Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Tahun 2022, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin, 28 Maret 2022.

terjadi di kemudian hari. Namun orang tidak mengenal lagi, siapa dulu yang melakukan pemekaran ini. Siapa pejabatnya, siapa timnya, dan apa yang sudah dilakukan waktu itu,” ucapnya menjelaskan kerumitan menyelesaikan persoalan tanpa arsip yang baik.

Sebab itu ia mengapresiasi rapat kerja ini sebagai bentuk kesungguhan dalam mengelola kearsipan. “Bapak Menteri Dalam Negeri juga sangat gembira dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga rapat kerja ini dapat meningkatkan sinergitas di antara kita untuk bersama-sama memajukan bangsa ini melalui tertib arsip. Kita juga berharap, rapat kerja nasional ini dapat merumuskan hal-hal yang dapat meningkatkan peran arsip, baik di pusat maupun di daerah,” pungkasnya.

Rapat kerja nasional ini akan dilangsungkan hingga 1 April

2022. Beberapa kegiatan, seperti penguatan lembaga kearsipan daerah, seminar tertib arsip dan sejarah desa, hingga workshop layanan dan kemitraan jasa kearsipan, menjadi bagian acara ini.

Kepala ANRI, Imam Gunarto, mengatakan kehadiran Kepala BSKDN dalam rapat kerja ini merupakan kehormatan besar bagi lembaganya. Ia mengharapkan akan tercipta kolaborasi yang lebih kuat dari masing-masing lembaga. “Ke depan kita akan berupaya membantu penyusunan strategi kebijakan di daerah, khususnya dalam bidang kearsipan,” ucap Imam.

• Robi

Kemendagri: Riset dan Inovasi akan Hasilkan Kebijakan Publik yang Optimal

Di tengah peralihan zaman yang kian cepat, pemerintah dituntut mampu beradaptasi dengan menyediakan berbagai program layanan publik yang relevan. Hal ini dapat dijawab melalui kebijakan yang didasari riset dan semangat inovatif. “Riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan,” ucap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto, dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Pemdagri di Provinsi Bangka Belitung, Kamis, 24 Maret 2022.

Salah satu bentuk peralihan zaman tersebut, Eko mencontohkan tatanan kehidupan yang berubah akibat pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. New normal life menjadi suatu keharusan, baik dalam kinerja organisasi ataupun dalam kehidupan keseharian kita,” terangnya.

Kebijakan dan program yang diluncurkan pemerintah pun, lanjut Eko, mesti menyesuaikan kondisi new normal life. Demikian dapat dilakukan pemerintah dengan inovasi program, melakukan kajian-kajian yang komprehensif, dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. Jika semuanya dilakukan, kebijakan dan program yang dijalankan pun dapat menjadi optimal. “Inovasi dan kolaborasi multi sektor menjadi jawaban di tengah kehidupan new normal life. Sehingga kita dapat hidup berdampingan

dengan Covid-19,” ucapnya lagi.

Sebab itu pula, di hadapan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Eko mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan budaya riset, inovasi daerah, dan sinergi pemerintah pusat dan daerah. “BSKDN fokus memberikan pembinaan agar kelembagaan riset dan inovasi di daerah dapat lebih kuat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Kepala BSKDN tersebut.

Menyambut tujuan itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bangka Belitung, Muhammad Soleh, mengucapkan terima kasih telah memilih Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi BSKDN. “Kami mewakili Gubernur Bangka Belitung mengucapkan terima kasih kepada BSKDN. Kami juga memohon arahan dan dukungan dari BSKDN Kemendagri agar kinerja kelitbangan dan inovasi daerah kami semakin baik di masa yang akan datang,” ucap Soleh.

Acara koordinasi ini selanjutnya diisi dengan diskusi terkait upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan inovasi daerah, penguatan fungsi organisasi kelitbangan, dan tata kelola pemerintahan. Sekretaris Badan Litbang dan Para Kepala Pusat Litbang Kemendagri tampil sebagai pemateri diskusi.

• Robi



LAPORAN UTAMA

gerak cepat

BINA INOVASI DAERAH

Teks Robi



Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat dengan turun langsung ke daerah setelah evaluasi Innovative Government Award (IGA) 2021. Enam titik wilayah menjadi tempat pembinaan dan berkumpulnya pemerintah daerah yang mendapat predikat kurang inovatif atau tidak dapat dinilai. Tim yang turun ke lapangan merasa puas dengan metode pembinaan langsung ini setelah dua tahun pembinaan dilakukan secara virtual akibat pandemi Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya pada gelaran IGA 2021, 29 Desember 2021 lalu mengatakan, “Pak Kaban jangan sampai hanya memberikan penghargaan itu (IGA) untuk daerah yang melakukan inovasi saja. Tapi juga umumkan daerah-daerah yang tidak melakukan inovasi, bahkan tidak dapat dinilai.”

BSKDN merupakan badan unit yang memprakarsai pengukuran indeks inovasi daerah. IGA adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memperoleh tingkatan teratas dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto pada malam itu mengumumkan di depan publik daerah mana saja yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah.

Setelah dirinya mengumumkan, dalam iring sambutan berikutnya, Tito mengatakan, selain bagi daerah yang inovatif, mengumumkan daerah-daerah yang kurang inovatif akan mendorong pemerintah daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerja mereka. “Kalau yang diumumkan yang dapat penghargaan (saja), kita Cuma dapat satu, yaitu memberikan kebanggaan kepada yang berinovasi. (Daerah) yang lain akan berusaha untuk berlomba-lomba supaya diberikan penghargaan. Tapi kalau kita mengumumkan daerah yang kurang inovatif juga, maka kita dapatkan yang kedua; publik akan menilai. Ini mau 2024,” tambahnya di hadapan hadirin IGA 2021.

Eko tampak serius memperhatikan amanat tersebut. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tersebut pun merasa perlu melakukan usaha lebih untuk membina daerah-daerah yang kurang inovasi dan tidak dapat dinilai pada tahun 2021. Sebagaimana Mendagri, Eko mengharapkan ada peningkatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Salah satu tujuan diselenggarakan IGA ini juga untuk mengetahui daerah mana yang perlu kita apresiasi, dan daerah mana yang membutuhkan pembinaan lebih untuk bersama-sama kita tingkatkan,” ucap Eko menyepakati arahan Kemendagri

Pada pagelaran IGA tersebut diketahui delapan provinsi, 17 kabupaten, dan 12 kota bernilai sangat inovatif. Demikian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 002.6-5848 tahun 2021. Dalam lampiran keputusan tersebut diketahui lebih kurang terdapat 166 pemerintah daerah kurang inovatif dan 23 pemerintah daerah yang tidak dapat dinilai.

Setelah Pagelaran IGA 2021

Pesan Menteri Dalam Negeri menjadi pembicaraan khusus di internal BSKDN. Pesan untuk menyebutkan nama-nama daerah yang kurang inovatif atau bahkan tidak dapat dinilai tidak dipahami secara normatif belaka. Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan mengatakan beberapa langkah dilakukan untuk merespons pesan tersebut. “Kita bergegas melakukan pemetaan dan selanjutnya mempersiapkan pembinaan langsung ke daerah,” ucap Theo, panggilan sapaannya,

Hal ini ditekankan Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi Daerah BSKDN, Jerry Walo. “Pesan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri itu kami lebih senang menyebutnya sebagai arahan yang bersifat komando ke bawah. Jadi kami bergerak cepat dengan melakukan revisi penganggaran agar dalam triwulan pertama tahun 2022 ini kami dapat melakukan pembinaan secara langsung, face to face, dengan pemerintah daerah, baik yang kurang inovatif ataupun yang tidak dapat dinilai,” ungkap Jerry.

Demikian diuraikannya ketika menjelaskan susunan kegiatan pembinaan daerah yang dilakukan BSKDN pada paruh pertama tahun 2022. Setidaknya enam daerah menjadi titik konsentrasi pembinaan, yaitu Surabaya, Medan, Jayapura, Ambon, Makassar dan Yogyakarta. Masing-masing wilayah selanjutnya menjadi lokasi pertemuan dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk pemerintah daerah yang tergolong kurang inovatif dan tidak dapat dinilai dalam Indeks Inovasi Daerah 2021.

Di Medan misalnya, kegiatan pembinaan dilakukan selama tiga hari, dari 15 hingga 18 Maret 2022. Tidak kurang dari 34 pemerintah kabupaten, dari Aceh hingga Sumatera utara, menghadiri acara bimtek tersebut. Jerry mengatakan dengan menggelar Bimtek, pihaknya semakin mengenali apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam meraih hasil indeks inovasi daerah yang memuaskan.

“Jadi saat ini melakukan Bimtek itu, memang interaktif. Jika ada yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah, mereka dapat langsung bertanya kepada tim teknis. Saya sebagai salah satu narasumber dalam Bimtek pun sangat bergembira dengan metode seperti ini (interaksi langsung). Tidak searah, namun dua arah. Sehingga

tim teknis bersama-sama dengan tim inovasi di daerah dapat mencontohkan secara langsung bagaimana proses penginputan data dan hal-hal lain terkait aplikasi indeks inovasi daerah,” jelas Jerry.

Eko pun menyatakan demikian. Dalam sambutannya, ketika membuka bimtek, ia menyebutkan pertemuan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjadi momentum untuk saling berkolaborasi dan membantu peningkatan kinerja masing-masing. “Mari Bapak dan Ibu, kolaborasi ini terus kita bina. Mumpung kita masih ada kesempatan, meskipun dalam waktu yang singkat ini,” ungkap Eko.

Begitu juga dalam hal inovasi daerah, Kepala BSKDN tersebut pun mengingatkan inovasi hendaknya tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Mengikuti anjuran Presiden Jokowi tentang inovasi, ia mengatakan, “Bagaimana inovasi ini tidak hanya menjadi pemikiran. Tidak hanya menjadi kewajiban saja, tapi juga menjadi budaya yang sudah melekat.” Demikian selalu Eko ulang di hampir setiap pertemuan Bimtek.

Pembinaan Interaktif Setelah Dipisahkan Covid

Bimtek yang dilakukan di enam wilayah tadi bukanlah upaya pembinaan baru. BSKDN telah melakukan beberapa kali pembinaan inovasi daerah, bahkan sebelum mendapatkan arahan Menteri Dalam Negeri pada IGA 2021. Mundur satu tahun ke belakang, beranjak dari IGA 2020, BSKDN juga melakukan pembinaan teknis pada pemerintah daerah yang kurang inovatif lewat indeks inovasi daerah tahun tersebut. Namun pembinaan pada tahun-tahun tersebut dirasa tidak maksimal karena keterbatasan yang disebabkan pandemi Covid-19.

“Karena pandemi, ada pelarangan-pelarangan, pembatasan-pembatasan. Kami di Badan Litbang tetap melakukan pembinaan. Tapi kami menyiasati dengan zoom ke seluruh daerah kabupaten dan kota yang termasuk dalam kategori kurang inovatif dan disclaimer (tidak dapat dinilai) tadi,” ujar Jerry.

Meskipun dalam banyak keterbatasan, Koordinator SDM Inovasi Daerah tersebut mengatakan pembinaan tidak boleh ditinggalkan. “Memang kalau melalui zoom ada beberapa kendala, kadang signal hilang timbul dan sebagainya. Walau dalam kondisi apa pun, fungsi pembinaan kami selalu jalan,” tegasnya.

Pembinaan lewat media virtual tersebut bukan tidak berefek sama sekali. Data Indeks Inovasi Daerah 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan jumlah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Penurunan paling kentara tampak pada kategori provinsi. Pada tahun 2020, pemerintah provinsi yang dinilai kurang inovatif berjumlah sepuluh daerah, dan pada 2021 menjadi hanya tiga provinsi saja.

Sub-koordinator Bidang Standar Kompetensi Badan Lit-



bang Inovasi Daerah, Arzad Sectio, yang bertugas langsung dalam teknis pembinaan mengatakan media virtual memang dapat membantu, namun timnya belum puas karena masih banyak pemerintah daerah berkategori tidak dapat dinilai.

“Memang tahun 2020 dan 2021 kemarin kita terkendala pandemi, tinggi-tingginya (angka penyebaran) Covid-19. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah (pembinaan) secara virtual. Memang ada progress. Penurunan jumlah (pemerintah daerah) disclaimer (tidak dapat dinilai itu dari 58 jadi 23. Tapi kami tidak cukup puas dengan itu. Pengennya semua daer-



Puslitbang Inovasi Daerah, BSKDN Kemendagri melaksanakan pembinaan inovasi daerah bagi daerah yang tidak dapat dinilai di Ambon, 30-31 Maret 2022.

ah melaporkan (data inovasi mereka). Tapi itu butuh kerja keras, tidak dapat hanya kerja dari BSKDN saja,” papar Arzad.

Sebab itu ia berharap metode pembinaan dengan berinteraksi langsung pasca penurunan angka penyebaran Covid-19 ini dapat menurunkan jumlah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai secara signifikan. “Harapannya partisipasi pemerintah daerah pun dapat meningkat, jadi

kita bisa sama-sama bergerak untuk selanjutnya meningkatkan kualitas inovasi daerah. Itu yang pengen kita capai. Kalau semua daerah maju, kan enak. Kalau semua daerah bergerak inovatif dan melaporkan datanya dengan baik agregat secara nasional juga akan meningkat,” ucapnya.

Jerry tidak kurang menautkan harapan. Ia juga menekankan, pembinaan inovasi daerah akan terus dilakukan BSKDN dengan berbagai cara. Pem-

binaan secara langsung dan virtual akan didukung dengan metode-metode lain. “Kita juga menyediakan video tutorial, panduan, pendampingan, dan jika ada pemerintah daerah yang ingin belajar langsung ke sini, kita akan sambut dengan tangan terbuka,” ungkap Jerry ketika ditemui di ruangnya.

• Robi

mengenal Kendala Pemda dalam Geliat Inovasi

Teks Robi Foto Freepik

Di antara tujuan yang ingin diraih Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika melakukan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan inovasi daerah adalah memetakan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda). Dari sana selanjutnya upaya pembinaan dan dukungan peningkatan inovasi daerah dirancang.

Saat menjadi pemateri dalam diskusi peningkatan inovasi daerah di Provinsi Jambi, 13 Juni 2022 lalu, Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto, sedikit demi sedikit membuka hasil evaluasi dalam Bimtek yang digelar secara maraton di enam wilayah Indonesia sejak Maret 2022. Ia mengatakan, dari aspek hukum dan pengaturan, jalan inovasi daerah sudah terbuka lebar. Peningkatan inovasi selanjutnya membutuhkan keaktifan dari para penanggung jawab di daerah.

“Kalau kita berbicara aturan Pak, Ibu. Semuanya sudah lengkap, baik Undang-Undang, PP-nya, juga Permendagrinya. Sekarang tinggal kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah kita ini,” ucapnya di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi.

Uraian hukum tersebut merujuk pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2017 hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 tahun 2018. Pada pasal 386 UU 23 tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemda dapat melakukan inovasi.

Dukungan undang-undang pada penyelenggaraan inovasi daerah dikuatkan dalam pasal 389 undang-undang yang sama. Pasal tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan inovasi daerah yang tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. “Jadi kalau inovasi gagal, tidak ada pidana. Artinya mari kita tingkatkan inovasi daerah ini. Sepanjang nawaitu (niat) kita baik, sepanjang mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi jangan ragu-ragu membuat inovasi,” ucap Kepala BSKDN tersebut.

Penekanan Eko agar pemda agar yakin dan bersungguh-sungguh dalam inovasi daerah merupakan salah satu hasil evaluasi Bimtek. Dalam perjalanannya, BSKDN mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemda hingga tergolong pada dua kategori terbawah dalam pengukuran indeks inovasi daerah.

Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi Daerah BSKDN, Jerry Walo, mengatakan beberapa alasan di antaranya. “Dalam pelaksanaan Bimtek, kami mendengar permasalahan-permasalahan di daerah. Memang ada sebagian masalah yang terdengar klise sedikit,



dan sebagian lagi memang ada masalah kondisional yang mesti kita terima. Contohnya ada persoalan terkait dengan jaringan internet dan infrastruktur,” ungkap Jerry.

Beragam persoalan juga diuraikan Sub-koordinator Bidang Standar Kompetensi Badan Litbang Inovasi Daerah, Arzad Sectio yang melakukan tugas teknis pendampingan di lapangan. “Ada hambatan sumber dayanya, ada hambatan dari komunikasi organisasinya, dan juga ada hambatan infrastrukturnya,” ungkap Arzad.

Memperkuat Komitmen Pemda

Dalam satu pertemuan pembinaan inovasi di Medan, pertengahan Maret lalu, Eko mengatakan. “Sebenarnya banyak program inovasi yang dilakukan pemda, namun tidak dipublikasikan. Banyak juga daerah yang tidak melaporkan program inovasinya. Mari sekarang, kita bersama-sama meningkatkan laporan kinerja inovasi daerah kita,” ungkapnya.

Ketidaklengkapan data mengakibatkan rendahnya penilaian dalam pengukuran indeks inovasi daerah. Demikian juga diakui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, ketika mengevaluasi penilaian untuk daerahnya yang mendapatkan predikat kurang inovatif pada penilaian tahun 2021.

“Saya yakin masyarakat mengakui bahwa inovasi yang dilakukan Bapak Gubernur Bali sangat banyak. Tapi ketika masuk arena pengukuran, ternyata hasilnya di bawah, ter-

masuk daerah yang tidak inovatif. Setelah saya mendalami, ternyata banyak yang tidak kita ikuti prosesnya,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) pengukuran empat indeks dari BSKDN, 19 Mei 2022.

Pembinaan dengan berinteraksi secara langsung antara pemda dan pemerintah pusat, juga diakui Sekda Bali, sebagai langkah yang solutif. Ia yakin daerah-daerah lain pun merasakan hal yang sama. “Semua indeks ini (yang disusun BSKDN) telah dirancang Kementerian Dalam Negeri dengan parameter-parameter yang jelas. Hanya saja kita di daerah belum memahaminya dengan baik. Maka kita perlu duduk bersama untuk menyatukan persepsi ini, untuk menyatukan pemahaman,” tambahnya lagi.

Pentingnya pemahaman pemda akan metode hingga tujuan pengukuran indeks inovasi daerah menurut Jerry, karena pemda penentu arah kebijakan inovasi di daerah. Dengan komitmen kepala daerah pada inovasi, Jerry mengatakan, cara pandang untuk inovasi pun dapat terbangun di daerah.

“Kepala daerah itu obor inovasi daerah itu sendiri. Kalau tidak ada komitmen dari kepala daerah, barangkali tidak ada perubahan mindset terkait dengan kinerja pemda. Ingat, tujuan dari penyelenggaraan indeks inovasi daerah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemda. Siapa yang menjadi penentu di sini? Ya, kepala daerah itu sendiri, yang dikerjanya didukung oleh para OPD (organisasi perangkat daerah),” ucap Jerry.



Arzad pun tak kurang memberi penjelasan. Ketika ia turut mendampingi pemda dalam proses pelaporan inovasi, ia melihat masih banyak pemda yang menganggap inovasi daerah itu berwujud program-program besar. Sehingga mereka merasa sulit meningkatkan dan menyusun program.

“Sebenarnya esensi inovasi itu kan perubahan. Hal kecil pun bisa disebut inovasi, misalnya pelayanan yang sebelumnya 10 meja dirombak menjadi tiga meja. Sekecil apapun perubahan baik itu, tentu kita sebut sebagai inovasi. Artinya, ini kita buka sedemikian luas, agar masing-masing pemda mau meningkatkan inovasi mereka,” ujarnya.

Demikian sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada pagelaran IGA

2021 lalu. Ia menguraikan strateginya posisi kepala daerah dengan kewenangan yang mereka miliki. Sebab itu, ia mengharapkan adanya pemimpin yang mumpuni menjawab tantangan-tantangan daerahnya.

“Kunci dari pemerintahan di daerah saat ini adalah leadership dari kepala daerah, yang memiliki konsep, yang dapat mengambil terobosan-terobosan kreatif. Karena banyak keterbatasan kewenangan pusat di daerah. Tapi ada ruang-ruang untuk kepala daerah untuk dapat berbuat terobosan kreatif. Ini menjadi kunci daerah tersebut untuk bisa mandiri dan menyejahterakan rakyatnya,” jelas Tito.

Solusi-solusi untuk Kendala Inovasi Daerah

Tantangan lain yang ditemukan

BSKDN dalam upaya peningkatan inovasi di daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai adalah ide inovasi dan infrastruktur. Tantangan yang disebutkan terakhir ini beragam pula, mulai dari kondisi pembangunan dan geografis daerah itu sendiri yang belum maksimal, hingga infrastruktur digital daerah yang menyulitkan mereka dalam proses pelaporan data inovasi.

Pada masing-masing tantangan tersebut, Eko acap menyebutkan rumus ATM. Demikian adalah akronim dari amati, tiru, dan modifikasi. Rumus tersebut disampaikannya karena melihat jumlah inovasi yang demikian besar di satu sisi, sedangkan di daerah lain banyak pemerintah daerah yang dinilai kurang inovatif.

“Kita bersyukur melihat jumlah inovasi. Tahun 2018, terdapat tiga ribuan

BADAN STRATEGI KEMENDAGRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RE YOGYAKARTA s/d 13 APR



Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih membuka acara Rapat Pembinaan Inovasi Daerah serta Sosialisasi dan Bimtek Daerah Kurang Inovatif dan tidak dapat dinilai di DI Yogyakarta, 12-13 April 2022.

inovasi. Tahun 2019 sudah meningkat menjadi delapan ribuan. Tahun 2020 meningkat lagi, 17 ribuan inovasi. Kemarin pada tahun 2021, ketika IGA, kurang lebih 25 ribuan,” cerita Eko dalam salah satu sambutannya pada Bimtek Inovasi Daerah untuk Daerah Kurang Inovatif dan Tidak Dapat Dinilai, akhir April lalu.

Jumlah inovasi yang demikian besar tersebut, lanjut Eko, dapat menjadi bahan pemda yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai untuk belajar. Pemda dapat belajar dari pemda lain dalam mengatasi persoalan-persoalan serupa di daerah mereka. Ia juga menyebutnya dengan difusi inovasi daerah.

“Dengan difusi inovasi, kita dapat melakukan replikasi dan modifikasi. Melalui cara itu, daerah-daerah yang kurang inovatif atau tidak dapat dinilai bisa mengejar ketertinggalan-

nya. Saya yakin dengan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, (prosesnya) akan lebih cepat,” ujarnya lagi.

Pada soal infrastruktur, khususnya perihal kendala internet di beberapa daerah yang menghambat mereka saat penginputan data, BSKDN pun tengah menyiapkan sarana yang lebih ringan digunakan. Hal ini disampaikan Arzad saat dikonfirmasi terkait adanya kendala jaringan internet di beberapa daerah.

“Iya, kita mendengar (kendala jaringan internet) dari pemerintah daerah. Saat ini kita juga tengah mengembangkan aplikasi yang lebih lite, versi digital. Kita akan coba bantu fasilitasi apa pun saran dan masukan dari pemda, tentu yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan dan kemampuan di sini (BSKDN),” ucapnya.

Selain itu, Sub-koordinator Bidang Standar Kompetensi Badan Litbang Inovasi Daerah tersebut juga menginformasikan, BSKDN juga memiliki grup WhatsApp fasilitator yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan saran, ataupun bertanya soal kendala di daerah.

“Kami juga membuka kontak pribadi kami kepada pemda, agar dapat secara langsung bertanya atau menyampaikan kendala mereka. Harapannya cara-cara ini dapat mempermudah pemda dalam melaporkan data dan meraih hasil maksimal dalam pengukuran indeks inovasi daerah,” ucapnya lagi.

• **Robi**

mempertahankan Indeks Inovasi Daerah yang Objektif

Setelah mengatakan perlunya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memublikasikan daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, pada Innovation Government Award (IGA) 2021, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian kemudian menyebutkan pentingnya menjaga marwah dan objektivitas pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Menurutnya, dengan pengukuran yang objektif, masyarakat Indonesia dapat menilai kinerja pemerintah daerah mereka dan bersama-sama menggerakkan pembangunan.

“Pesan saya kepada Pak Kaban juga, agar ini (IGA) betul-betul disegani. Momentum ini disegani. Penilaiannya harus objektif. Saya pun tidak ikut campur. Saya pun tidak ikut mesan-mesan. Ndak!” tegas Tito.

Indeks Inovasi Daerah memang dirancang sedemikian rupa agar dapat mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah dengan teliti di setiap wilayah Indonesia. Dalam setiap pertemuan dengan pemerintah daerah, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan yang bertanggung jawab dan fokus dalam bidang ini di BSKDN, selalu menyebutkan bahwa mekanisme pengukuran indeks tidak memberi peluang pada kecurangan dan dinilai secara sistematis.

“Kita bekerja dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Tahun 2017, yaitu efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, terbuka, berdasarkan nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Theo, panggilan akrabnya, saat memberi bimbingan teknis pada salah satu

pemerintah daerah, akhir Mei lalu.

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah itu sendiri dilakukan pada 36 indikator, yang terangkum dalam delapan variabel. Delapan yang dimaksud terdiri dari institusi, sumber daya manusia, ekosistem inovasi, infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan hasil kreatif.

“Masing-masing variabel ini ada nilainya untuk pengukuran satu daerah. Jadi kita bisa mengetahui di bagian mana keunggulan suatu daerah dan di bagian mana yang perlu ditingkatkan. Kami punya datanya secara lengkap dan bisa dicek,” ujarnya lagi.

Tidak hanya menjadi tuturan, demikian ditunjukkannya langsung setiap pemerintah daerah yang melakukan kunjungan dan koordinasi inovasi daerah di kantor BSKDN. Pemerintah Bali adalah salah satunya. Theo memperlihatkan data infografis penilaian indeks inovasi daerah Provinsi Bali, dari tahun 2020-2021.

“Jumlah inovasi yang diinput pada tahun 2020 sebanyak 9 inovasi dan tahun 2021 sebanyak 18 inovasi. Provinsi Bali mengalami peningkatan pada variabel kecepatan bisnis proses, infrastruktur, kecanggihan produk, dan hasil kreatif. Kemudian Provinsi Bali mengalami penurunan pada variabel institusi dan SDM,” ungkap Theo di hadapan jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali yang berkunjung ke BSKDN, pertengahan Februari 2022 lalu.

Ketika ia menguraikan tampak dari pantulan layar proyektor infografis berupa jaring laba-laba yang menunjukkan nilai untuk masing-masing variabel. Variabel institusi, yang disebut Theo mengalami penurunan, ter-

lihat berjarak dari titik angka 30 yang berwarna oren tertanda tahun 2021 dan titik 63,64 yang berwarna biru tertanda tahun 2020.

Tidak sampai di situ, objektivitas pengukuran indeks tidak hanya ditunjukkan lewat angka statistik belaka namun juga dalam rangkaian proses. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian dan Pemberian Penghargaan/insentif Inovasi Daerah, semua proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah berjalan dalam tujuh tahap.

Dijelaskan dari pasal 5 hingga 18 Permendagri Nomor 104 tahun 2018, tahapan tersebut dimulai dari penjarangan, pengukuran, penilaian, validasi lapangan, penetapan, penghargaan, dan insentif. “Pada tahap penjarangan, kita menggunakan sistem yang transparan dan real time. Validasi dalam pengukuran indeks juga dilakukan oleh pihak yang independen, begitu juga dengan penilaian dan validasi di lapangan,” ungkapnya lagi.

Tim independen tersebut terdiri dari gabungan universitas dan kementerian-lembaga lain di luar Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal ini, Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto pernah mengatakan, “Agar ini (IGA) tidak hanya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi (menjadi kerja) kolaborasi antar government.”

Gandeng Universitas Perkuat Validasi Indeks Inovasi Daerah

Pada IGA 2021 lalu, selain Kementerian Dalam Negeri, terdapat delapan lembaga lain yang turut menjadi penilai inovasi daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pe-

rencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI), Universitas Indonesia (UI), Kemitraan Partnership, dan MNC News. Lembaga-lembaga ini menjadi kesatuan tim yang bekerja secara independen.

Tahun ini proses kerja yang independen terus dijalankan. Lembaga yang turut terlibat pun bertambah. Dari pihak kampus, selain UI, validasi dan penilaian indeks inovasi daerah juga melibatkan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. BSKDN telah bersepakat dengan UGM terkait hal ini April 2022 lalu.

Theo mengatakan kerja sama dengan UGM akan turut memperkuat proses penilaian indeks inovasi daerah. Ia tidak hanya meminta UGM untuk memberikan penilaian semata. Namun ia juga mengajak lembaga tersebut untuk berkolaborasi dalam mencari jalan keluar atas kendala inovasi yang dihadapi pemerintah daerah.

“Terkadang pegawai yang sudah mengikuti pelatihan, ketika pula ke daerah masing-masing tidak melanjutkan melakukan perubahan,” keluh Theo waktu itu tentang sumber daya aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan pembinaan inovasi daerah.

Wawan Mas’udi, Dekan Fisipol UGM, yang menyambut tim BSKDN pun menyatakan kesiapan lembaganya untuk berkolaborasi. Keikutsertaan mereka didasarkan semangat yang sama pada visi pembentukan pemerintahan yang baik di daerah. “Inovasi tidak mungkin terpisah dalam pelayanan publik di daerah untuk meraih apa yang kita sebut good governance,” ungkap wawan.

Hal ini juga diceritakan Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi Daerah BSKDN, Jerry Walio saat ditemui di ruangannya, “Terkait validasi, (tahun ini) kami sudah

menggandeng dua universitas negeri. Kami sudah ada kesepakatan. Waktu ada pembinaan (bimtek) di Yogyakarta kami sudah menemui Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada. Kami juga sudah bersepakat dengan pihak Universitas Indonesia,” jelas Jerry.

Keikutsertaan pihak universitas, lanjut Jerry, sangat penting karena pihak kampus akan menjalankan penilaian dengan corak akademik yang kuat dan terhindar dari bias kepentingan tertentu. “Pada saat penilaian, masuk ke quality control, menjadi sangat objektif. Sehingga kami (BSKDN Kemendagri) hanya fasilitator. Yang menjadi penentu dari penilaian tersebut adalah tim independen yang kami ambil dari perguruan tinggi tadi,” tambahnya.

Menyongsong IGA 2022

Setelah melakukan pembinaan pada pemerintah daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai pada indeks inovasi daerah 2021 di enam wilayah, jajaran tim pembinaan optimis pada pengurangan jumlah daerah dalam dua kategori yang disebutkan. Jerry mengatakan tugas BSKDN adalah melakukan pembinaan, termasuk pada soal inovasi daerah ini. Pihaknya sudah melakukan pembinaan dan memotivasi pemerintah semaksimal mungkin.

Ia mengharapkan adanya penurunan signifikan pada dua kategori yang menjadi sasaran pembinaan. “Seandainya turun 60 persen, berarti target kita tercapai. Artinya target pembinaan kita tercapai dan teman-teman (pemerintah daerah) yang mengikuti Bimtek bisa memahami (dengan baik pembinaan yang dilakukan). Tinggal bagaimana komitmen pemimpin di daerah dan bagaimana kolaborasi dan koordinasi dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah),” ucap Jerry.

Ia juga mengharapkan seluruh pemerintah daerah, tanpa terkecuali, tidak jemu berinovasi. Baginya pemerintah daerah tidak perlu merasa kehabisan ide untuk berinovasi. Selain mereka bisa menduplikasi inovasi daerah lain,

Jerry juga menyarankan pemerintah daerah untuk menggandeng inovasi yang telah dilakukan masyarakat di daerah masing-masing.

Ia meminta pemerintah daerah belajar pada pemerintah lain yang berhasil berkolaborasi dengan masyarakatnya. “Banyak juga pemerintah daerah, dalam rangka menumbuhkan inovasi di masyarakat, mereka membuat kegiatan semacam lomba inovasi. Event ini membuka ruang masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan baru yang dapat diserap oleh pemerintah daerah,” cerita Jerry.

Pemerintah daerah, menurut Jerry, tidak boleh melepaskan masyarakat mereka untuk berinovasi saja. “Ketika masyarakat membuat kreativitas baru, itu baru sebatas apa yang disebut inovasi. Ketika kita menyebut istilah atau namanya inovasi daerah, harus ada peran pemerintah di situ. Apabila pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawalan, dan menggandeng inovasi masyarakat, barulah itu akan menjadi inovasi daerah,” ucapnya melanjutkan.

Soal memotivasi pemerintah daerah, Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto tidak kurang pula memberikan penekanan. Baginya banyak inovasi daerah yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Tinggal kemauan masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja mereka.

“Indeks inovasi daerah ini dan indeks-indeks lain yang telah disusun berguna mengetahui kinerja pemerintah daerah secara objektif. Aturan hukumnya sudah ada dan lengkap. Tinggal bagaimana kita mengupayakannya. Ini butuh pemahaman kita bersama. Hal ini memang tidak mudah. Namun kita tetap harus terus upayakan, untuk kemajuan kita bersama,” ungkapnya pada diskusi kelompok terpumpun tentang empat indeks yang dikelola BSKDN Kemendagri, di Bali, 19 Mei 2022 lalu.

• Robi



PENERIMAAN PENGHARGAAN

INNOVATIVE GOVERNMENT

AWARD 2021

IGA AWARD 2021



KATEGORI KOTA TERINOVATIF

1. KABUPATEN BANYUWANGI
2. KABUPATEN WONOGIRI
3. KABUPATEN BOGOR
4. KABUPATEN TABALONG
5. KABUPATEN TEGAL
6. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
7. KABUPATEN MUARA ENIM
8. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
9. KABUPATEN TANGGAMUS
10. KABUPATEN BOJONEGORO

KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

1. PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3. PROVINSI JAWA BARAT
4. PROVINSI JAWA TENGAH
5. PROVINSI JAWA TIMUR

KATEGORI DAERAH PERBATASAN TERINOVATIF

1. KABUPATEN PULAU MOROTAI
2. KABUPATEN BINTAN
3. KABUPATEN SAMBAS

KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

1. KOTA SURABAYA
2. KOTA SINGKAWANG
3. KOTA PADANG PANJANG
4. KOTA TANGERANG
5. KOTA CIMAHI
6. KOTA YOGYAKARTA
7. KOTA MAKASSAR
8. KOTA MOJOKERTO
9. KOTA PROBOLINGGO
10. KOTA PARIAMAN

KATEGORI DAERAH TERTINGGAL TERINOVATIF

1. KABUPATEN SUMBA TIMUR
2. KABUPATEN BELU
3. KABUPATEN NABRE

“**PEMIMPIN YANG
KONSEPTUAL** **DITAMBAH
INOVATIF** ITU MENJADI
KUNCI **KEBERHASILAN**
DAERAH UNTUK BISA
MANDIRI SECARA
FISKAL, KEMUDIAN BISA
MENSEJAHTERAKAN
BETUL RAKYATNYA.”

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian
saat memberikan sambutan dalam gelaran
Innovative Government Award 2021,
Rabu, 29 Desember 2021

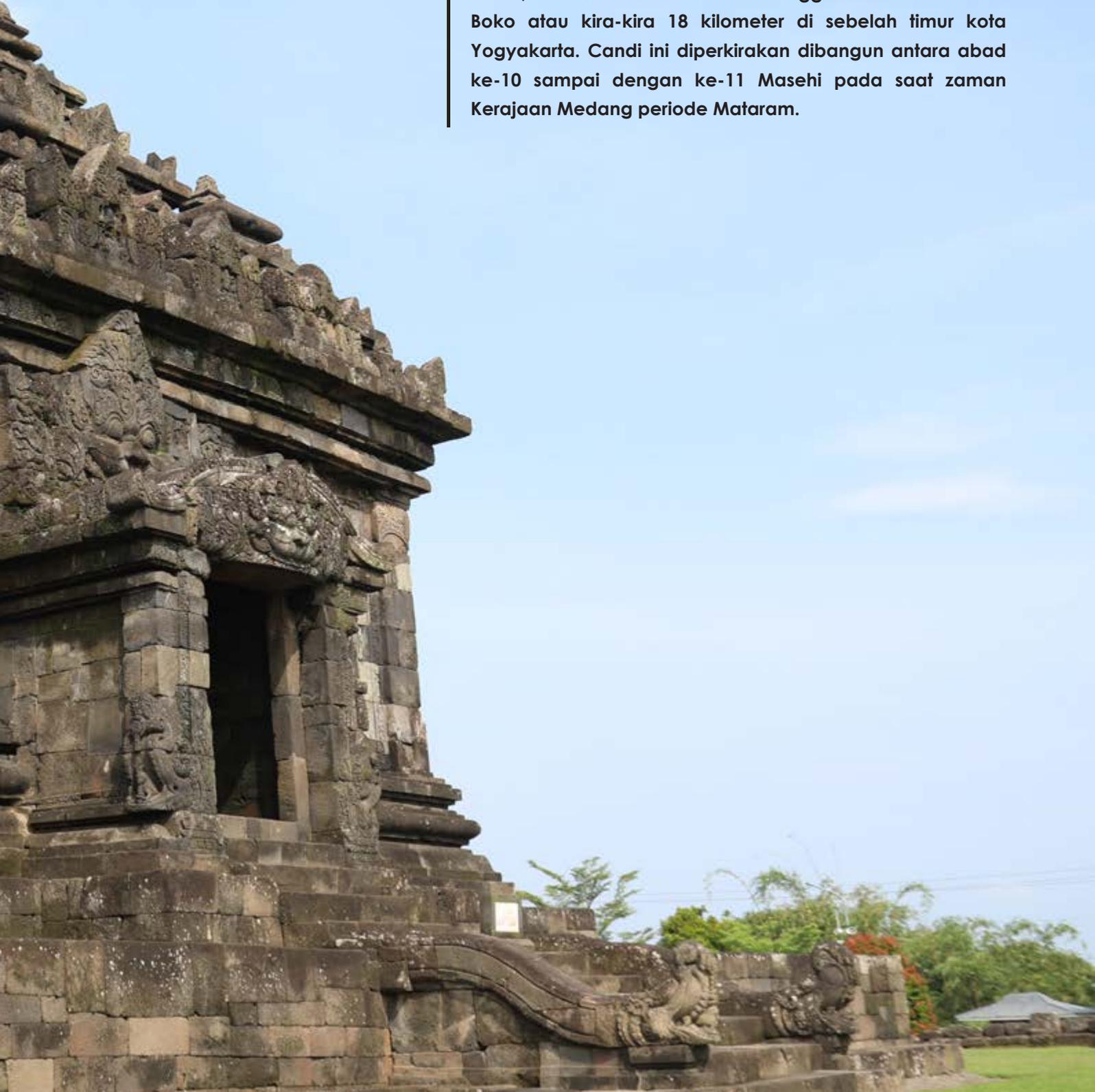


... lensa matra



"Candi Ijo"

Candi Ijo adalah sebuah kompleks percandian bercorak Hindu, berada 4 kilometer arah tenggara dari Candi Ratu Boko atau kira-kira 18 kilometer di sebelah timur kota Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-10 sampai dengan ke-11 Masehi pada saat zaman Kerajaan Medang periode Mataram.

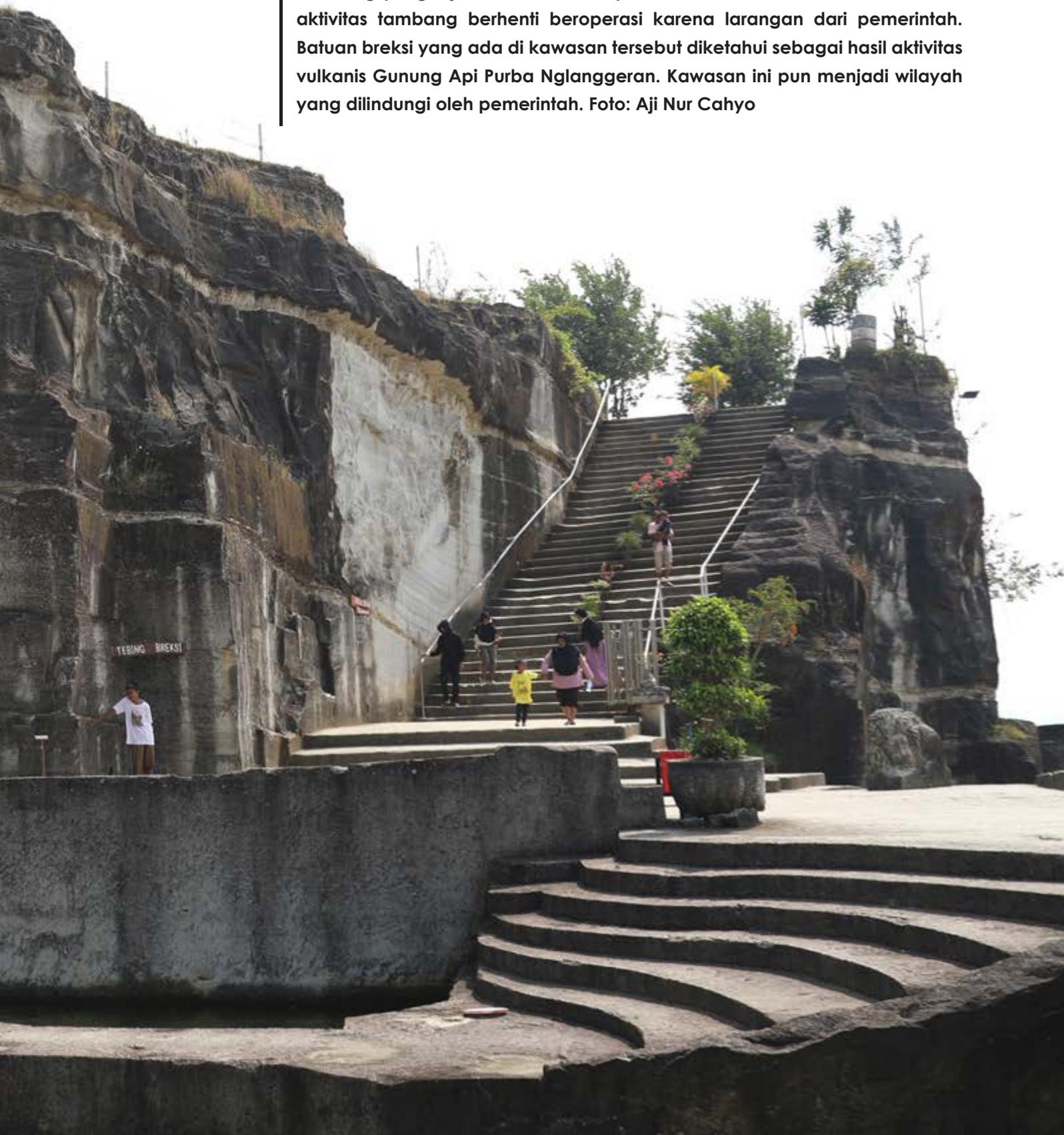


... lensa matra



“Tebing Breksi”

Tebing Breski merupakan obyek wisata yang terletak di Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Obyek wisata ini berupa perbukitan batuan breksi bercorak unik. Tempat wisata ini merupakan bekas tambang yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 2014 silam, aktivitas tambang berhenti beroperasi karena larangan dari pemerintah. Batuan breksi yang ada di kawasan tersebut diketahui sebagai hasil aktivitas vulkanis Gunung Api Purba Nglanggeran. Kawasan ini pun menjadi wilayah yang dilindungi oleh pemerintah. Foto: Aji Nur Cahyo



DAMPAK INOVASI DAERAH

Perlu diukur dan dipertimbangkan

Ahmad Gamal S.Ars., M.Si., M.U.P., Ph.D.

Dosen, Direktur ISTP Universitas Indonesia.

Pendidikan:

Doctoral Degree, University of Illinois at Urbana-Champaign (2016)

Sejak dua tahun yang lalu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) guna memperkuat indeks inovasi daerah. Tidak hanya soal penilaian, pada tahun ini, BSKDN juga mengajak UI untuk turut terlibat dalam validasi indeks inovasi daerah. Keterlibatan UI dalam proses ini, disebut Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto akan semakin memperkuat objektivitas indeks.

Innovation dan Science Techno Park (ISTP) adalah lembaga yang ditunjuk langsung pihak UI untuk terlibat aktif dalam proses ini. Tim Redaksi Media BPP berkesempatan bertemu langsung dengan Direktur ISTP UI, Ahmad Gamal pada Rabu, 22 Juni 2022, di ruangnya. Wawancara pun berlangsung lebih kurang satu jam. Gamal bercerita tentang banyak hal, mulai dari konsentrasi riset yang ia dan lembaganya lakukan, hingga apa saja yang dapat dilakukan pe-

merintah daerah dalam meningkatkan inovasi di daerah mereka masing-masing.

Gamal menjabat sebagai Direktur ISTP sejak Februari 2020 lalu. Sebelum meraih posisi tersebut, ia telah melakukan banyak aktivitas dan kajian dalam bidang pembangunan. Salah satu di antaranya adalah proyek bersama USAID tentang Smart City. Proyek yang membuatnya berkolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, dalam perkiraan Gamal,



Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) guna memperkuat indeks inovasi daerah. Tidak hanya soal penilaian, pada tahun ini, BSKDN juga mengajak UI untuk turut terlibat dalam validasi indeks inovasi daerah.

menjadi salah satu yang mengantarkan pada posisinya yang sekarang.

“(Projek) itu adalah cikal bakal penelitian Smart City yang saya kelola. Mungkin track record seperti itu yang dilihat oleh pimpinan universitas. Mungkin saya di anggap dapat mengembangkannya pengalaman membangun aliansi dengan banyak pihak waktu itu untuk memimpin ISTP” ujarnya.

Meskipun begitu, ia lebih suka dilihat sebagai seorang dosen, pengajar, atau peneliti. Memang selain bertanggung jawab atas sejumlah projek kerja sama, ia juga aktif mempublikasikan hasil risetnya. Publikasinya membicarakan banyak hal, mulai dari tata ruang, pemanfaatan big data, hingga teknologi informasi.

Ketika kami bertanya bagaimana ketiga pokok riset yang ia lakukan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, Gamal menjawab bahwa saat ini ketiga aspek tersebut telah tersedia cukup baik di banyak daerah Indonesia. Baginya, tantangan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyelaraskan masing-masing aspek dengan kondisi spesifik Indonesia.

“Saya pribadi menganggap bahwa Indonesia sudah advance dalam tiga hal ini (tata ruang, pemanfaatan big data, dan teknologi informasi). Sekarang bagaimana menstimulasikan ketiga-tiganya agar bisa berjalan berbarengan. Ini misalnya dapat kita lihat dalam Smart City. Di banyak daerah, itu (Smart City) sudah sangat massif. Itu menggambarkan betapa kemajuan teknologi informasi, kemudian juga ada pemanfaatan big data oleh pemerintah, kemudian juga ada kebijakan yang cukup baik untuk reformasi agraria,” ungkap Gamal.

Ketika ditanyai lebih lanjut tentang tantangan tersebut, Ia menjabarkan, “Pak Presiden, misalnya, sudah mengemukakan bahwa kita mesti punya satu data terpadu, yang dikenal dengan Satu Data Indonesia. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Untuk memiliki satu data, produksi datanya harus dikomunikasikan antar badan dan lembaga,” jelasnya lagi.

Ia mencontohkan dalam tata kelola tanah. Dalam pengelolaan data tanah, lembaga yang memiliki hak untuk menentukan peta dasar dan stadarisanya Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun, jelasnya lagi, lembaga yang memproduksi data kepemilikan tanah bukanlah BIG, melainkan Kemente-

rian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sayangnya, lembaga yang disebutkan terakhir belum menggunakan standar yang dibuat oleh BIG.

“Untuk menyesuaikan itu tidak mudah. Saya yakin teman-teman di ATR/BPN punya semangat yang sama dalam satu data. Tapi bagaimana dengan data yang telah dihasilkan selama puluhan tahun ini. Ada data yang digital, ada yang manual. Jadi untuk mengonversi seluruhnya menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi tidak mudah,” ungkapnya.

Cara yang paling memungkinkan dalam problem tersebut, menurutnya, adalah penggunaan teknologi informasi dengan maksimal. Namun, ia juga mengingatkan, teknologi hanya sarana yang membutuhkan koordinasi dan kemauan bersama.

“Seperti pulpen ini,” ujarnya sambil menulis. “Kalau tidak saya gerakkan. Tidak saya goreskan, tidak akan menjadi tulisan. Untuk menggerakkan (teknologi) ini juga tidak mudah. Harus ada koordinasi lintas lembaga. Harus ada yang berinisiatif. Siapa yang mau bergerak duluan? Jadi tidak gampang juga,” tambahnya lagi.

Anjurkan Program Inovatif Berbasis Dampak

Keterlibatan Gamal dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang diprakarsai BSKDN Kemendagri juga menumbuhkan pemahamannya akan perlunya pemerintah daerah mempertimbangkan dampak kemanfaatan program inovasi daerah. Hal ini dikemukakan Gamal ketika kami tanya pendapatnya tentang kerja sama UI dan BSKDN.

Gamal melihat banyak program inovasi yang disusun pemerintah daerah belum mempertimbangkan hal tersebut. Padahal demikian, menurutnya, adalah tujuan dari inovasi itu sendiri. Ia mencontohkan banyak aplikasi pasar digital yang dibuat pemerintah daerah namun tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat di daerah tersebut.

“Sudah banyak marketplace, tapi tidak ada isinya. Pemerintah daerah mesti punya kapasitas untuk mengukur dampak dari program inovasi yang mereka buat. Sebenarnya seberapa besar dampak dan manfaat dari marketplace ini. Apakah program itu lebih baik daripada membuat pendampingan pada UMKM agar dapat masuk ke marketplace yang sudah ada, yang jaringannya sudah banyak di tahap nasional, bahkan internasional,” urai Gamal mengajak untuk mempertimbangkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, mempertimbangkan dampak program bukan hal yang baru untuk kerja inovasi. Dari pengalamannya menjadi bagian dari tim penilai dalam IGA 2021 lalu, Gamal menemukan banyak program inovasi daerah yang berdampak besar untuk masyarakat, meskipun di wilayah lain program tersebut sudah dianggap hal biasa.

“Di salah satu daerah di Indonesia timur, bagaimana pemerintah daerah di sana memanfaatkan kontainer-kontainer untuk kebutuhan lumbung perikanan yang tidak memiliki danau atau empang. Kalau di pulau Jawa itu bukan merupakan inovasi. Tapi kalau di daerah kecil dan terpencil seperti di sana, itu betul-betul bermanfaat dan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat,” ungkap Gamal lagi.

Harapan untuk Pemerintah Daerah

Dalam membentuk paradigma inovasi daerah berbasis dampak kebermanfaatan tersebut, Gamal mengapresiasi kerja BSKDN. Baginya, BSKDN telah menunjukkan diri sebagai badan yang mampu menjawab berbagai perubahan. “Kami berdiskusi dengan teman-teman BSKDN dan melihat borang (indeks inovasi daerah) sudah berbeda. Borangnya sudah menampilkan dan

menuntut pemerintah daerah untuk menampilkan apa dampak dari program inovasi yang dilakukan,” katanya mengapresiasi.

Ia mengharapkan pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan borang yang baru ini. Sebab demikian akan semakin merangsang daerah untuk lebih meningkatkan manfaat program mereka. “Tuntutan ini (menjelaskan dampak inovasi), menurut saya, bukan untuk menyulitkan pemerintah daerah. Tapi kita ingin mengedukasi. Sehingga di tahap perencanaan selanjutnya mereka dapat berpikir, program yang akan dibuat dampaknya seperti apa,” jelas Gamal.

Tidak berhenti di situ, ketika kami minta harapannya untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah, Gamal mengatakan bahwa ia ingin pemerintah daerah tidak terpatok pada siklus anggaran. Sehingga demikian menghalangi kinerja mereka.

“Saya sering mendengar, ‘ide Bapak menarik, tapi belum bisa kami lakukan, karena anggarannya sudah selesai Pak, pros-

perencananya.’ Padahal yang kita harapkan adalah memperkuat komunikasi dan komitmen saja terlebih dahulu,” cerita Gamal.

Ia menyadari anggaran memang menjadi hal utama dalam serangkaian aktivitas pemerintah daerah. Namun banyak hal, menurutnya, yang dapat dilakukan untuk memperkuat kinerja dan hasil yang diraih nantinya. “Diskusi seperti ini kan tidak menggunakan anggaran. Kita tinggal mengubah proses bisnisnya, sehingga banyak manfaat yang dapat diraih,” pungkas Gamal.

• Robi



Analisis Indikator Satuan Inovasi Daerah pada Indeks Inovasi Daerah



Dyah Ayu Kusumaningrum, S.Si
Statistisi Ahli Pertama
Badan Litbang Kemendagri



Septian Putri Palupi, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
Badan Litbang Kemendagri

Inovasi daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah. Peraturan ini pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kearifan lokal. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, melalui fungsi pembinaan, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba sampai pada proses keberhasilan uji coba, yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada. Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, tahapan penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu penjaringan, pengukuran indeks, presentasi, dan validasi lapangan.

Peningkatan partisipasi daerah dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah pada 2021 ini menghasilkan jumlah inovasi yang semakin banyak. Perkembangan jumlah inovasi

tersebut adalah pada tahun 2018 diikuti oleh 188 pemda dengan jumlah inovasi 3.718; pada tahun 2019 diikuti oleh 260 pemda dengan jumlah inovasi 8.016; pada tahun 2020 diikuti oleh 484 pemda dengan jumlah inovasi 17.779; dan pada tahun 2021 ini diikuti oleh 519 pemda dengan jumlah inovasi secara keseluruhan 25.124.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan telah melakukan upaya peningkatan kualitas Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021 melalui penyempurnaan indikator dan parameter penilaian. Metodologi Penilaian Indeks Inovasi Daerah ini dilakukan dengan cara menghitung besaran nilai skor berdasarkan indikator dan satuan parameter sesuai data atau informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Nilai atau skor Indeks Inovasi Daerah dihitung berdasarkan informasi yang diisikan oleh daerah pada 2 aspek yaitu Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah. Dari kedua aspek tersebut terhimpun 7 variabel yang mewakili seluruh 36 Indikator Inovasi Daerah. Data inovasi daerah

yang disampaikan oleh daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat atau ranking Indeks Inovasi Daerah jika data inovasi daerah yang disampaikan disertai dengan data pendukung atau *evidence* pada masing-masing indikator baik pada aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada tahun ini lebih mengutamakan kualitas inovasi daerah dengan mengedepankan kelengkapan informasi dan data pendukung atau *evidence* sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kelengkapan data pendukung atau *evidence* ini menjadi salah satu kunci untuk mengukur tingkat kematangan suatu inovasi.

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1987 menyatakan NKRI terbagi ke dalam tiga zona waktu yakni Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Tengah maupun Waktu Indonesia Timur. Wilayah Indonesia yang berada di zona Waktu Indonesia Barat adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura. Provinsi yang termasuk dalam zona waktu ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Aceh, Sumatera Barat,

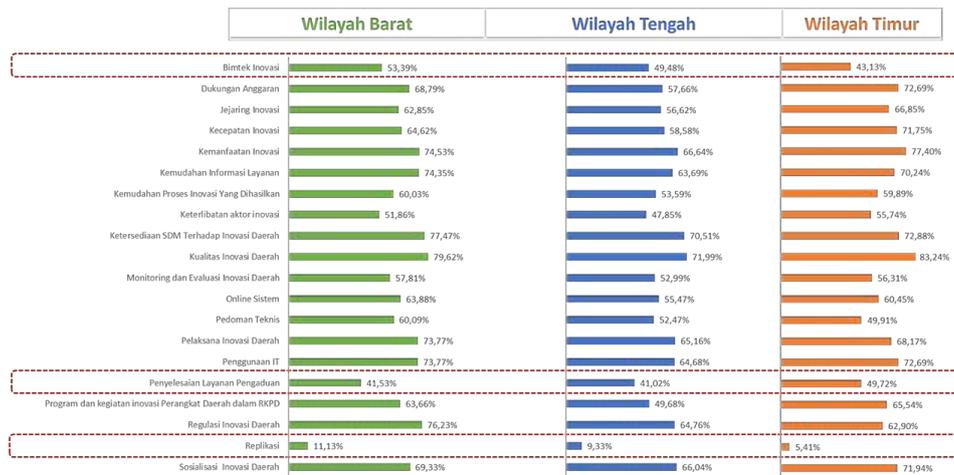
Sumatera Utara. Kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wilayah Indonesia yang berada di zona Waktu Indonesia Tengah adalah Bali, Kalimantan bagian Utara, Timur dan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan Wilayah Indonesia yang berada di zona Waktu Indonesia Timur ini meliputi dua pulau, yaitu Maluku dan Papua. Untuk provinsi meliputi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Adapun poin yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri):

Muhammad Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2021 yang menegaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan tim khusus untuk menginventarisasi persoalan atau kendala yang dihadapi daerah dalam hal pelaporan data inovasi daerah. Secara garis besar, persoalan atau kendala yang dihadapi oleh daerah dapat digambarkan melalui tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* pada tiap indikator. Ketidakterisian data pendukung atau *evidence* ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak terstrukturnya database inovasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD pada suatu

daerah, inovasi sudah dilakukan oleh daerah namun tidak teridentifikasi sebagai inovasi sehingga dokumennya tidak terorganisir dengan baik, atau karena adanya persepsi bahwa kuantitas inovasi lebih diutamakan dari pada kualitas inovasi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Dalam melihat persoalan atau kendala yang dihadapi daerah maka dapat digunakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu sehingga diharapkan bahan pertimbangan yang dihasilkan dari analisis ini akan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah, dapat dilihat indikator pada Satuan Inovasi Daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* yang rendah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menginventarisasi persoalan atau kendala yang ada di daerah-daerah tertentu. Untuk melihat tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* pada tiap indikator Satuan Inovasi Daerah digunakan data inovasi yang termasuk dalam kriteria penilaian Indeks Inovasi Daerah yaitu data inovasi pada tahun 2019 dan 2020 yang telah berada dalam tahapan penerapan serta dibedakan berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu yaitu wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Selain itu, dari data tersebut dapat dilihat juga tingkat pencapaian skor indikator dari skor maksimal pada tiap indikator Satuan Inovasi Daerah.

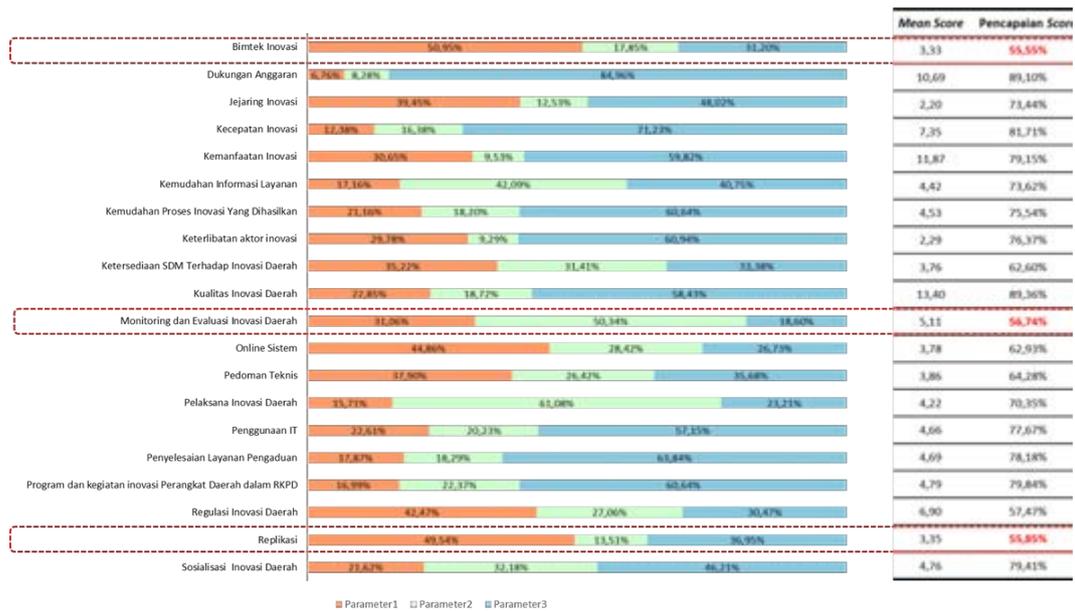


Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data yang digunakan, diperoleh informasi bahwa pada ketiga wilayah tersebut memiliki pola yang relatif sama. Indikator-indikator dengan tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* yang tinggi di satu wilayah ternyata juga cenderung tinggi di wilayah lain begitupun sebaliknya. Pada wilayah bagian barat, persentase tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* berada pada rentang 11,13% sampai dengan 79,62%. Pada wilayah bagian tengah, persentase tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* berada pada rentang 9,33% sampai dengan 71,99%. Sedangkan pada wilayah bagian timur, persentase tingkat keterisian data

pendukung atau *evidence* berada pada rentang 5,41% sampai dengan 83,24%.

Indikator kualitas inovasi daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* paling tinggi dibandingkan dengan indikator yang lain yaitu sebesar 79,62% di wilayah bagian barat, 71,99% di wilayah bagian tengah, dan 83,24% di wilayah bagian timur. Sedangkan indikator-indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung atau *evidence* yang relatif rendah pada ketiga wilayah tersebut adalah indikator penyelesaian layanan pengaduan, bimtek inovasi, dan replikasi.

Wilayah Bagian Barat



Jika dilihat dari sisi kualitatif berdasarkan pencapaian skor indikator untuk daerah-daerah di wilayah bagian barat, secara umum dapat dilihat bahwa semakin tinggi persentase pencapaian skor, maka semakin tinggi juga persentase pengisian parameter 3 pada tiap indikator Satuan Inovasi Daerah, begitupun sebaliknya. Untuk daerah pada wilayah ini, dapat diketahui bahwa indikator-indikator yang memiliki persentase pencapaian skor yang relatif rendah yaitu indikator *monitoring* dan evaluasi inovasi

daerah, bimtek inovasi, dan replikasi.

Indikator dengan persentase pencapaian skor tertinggi adalah indikator kualitas inovasi daerah yaitu sebesar 89,36% atau dapat dikatakan bahwa sebesar 58,43% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian barat ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* yang berupa video inovasi yang memuat lima (5) unsur substansi yaitu latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak

inovasi. Sedangkan indikator dengan persentase pencapaian skor terendah adalah indikator bimtek inovasi yaitu sebesar 55,55% atau dapat dikatakan bahwa hanya sebesar 31,20% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian barat ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* berupa SK/ST, daftar hadir, atau undangan terkait bimtek inovasi yang dimaksud sejumlah minimal 2 kali pelaksanaan bimtek dalam 2 tahun terakhir.

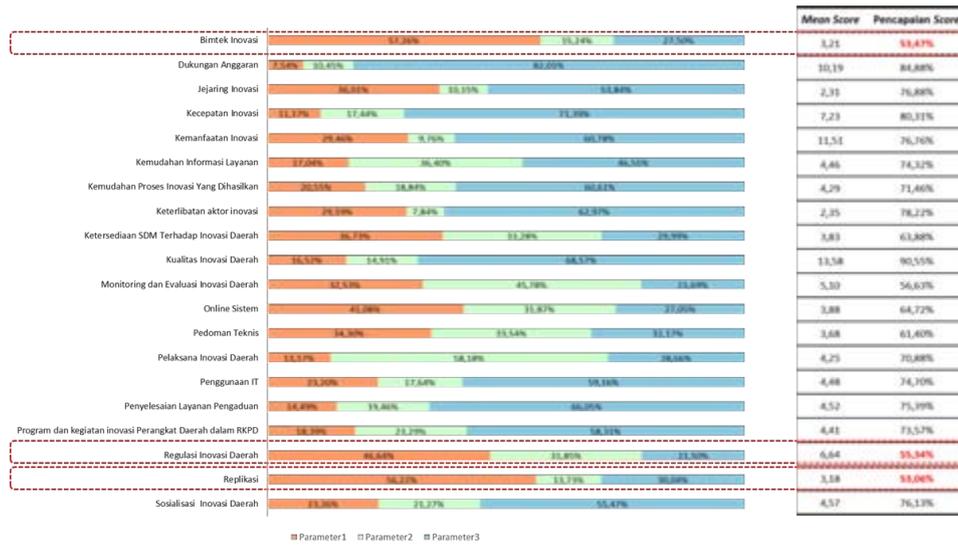
Wilayah Bagian Tengah

Jika dilihat dari sisi kualitatif berdasarkan pencapaian skor indikator untuk daerah-daerah di wilayah bagian tengah, secara umum dapat dilihat bahwa semakin tinggi persentase pencapaian skor, maka semakin tinggi juga persentase pengisian parameter 3 pada tiap indikator Satuan Inovasi Daerah, begitupun sebaliknya. Untuk daerah pada wilayah ini, dapat diketahui bahwa indikator-indikator yang memiliki persentase pencapaian skor yang relatif rendah yaitu indikator bimtek inovasi, regulasi inovasi

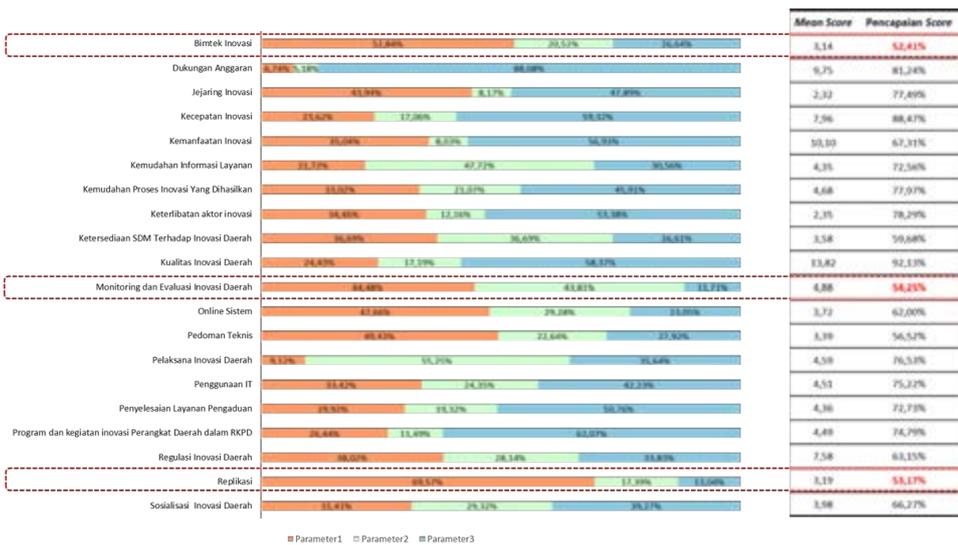
daerah, dan replikasi.

Indikator dengan persentase pencapaian skor tertinggi adalah indikator kualitas inovasi daerah yaitu sebesar 90,55% atau dapat dikatakan bahwa sebesar 68,57% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian tengah ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* yang berupa video inovasi yang memuat lima (5) unsur substansi yaitu latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak

inovasi. Sedangkan indikator dengan persentase pencapaian skor terendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 53,06% atau dapat dikatakan bahwa hanya sebesar 30,04% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian tengah ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* berupa dokumen MoU replikasi atau Perjanjian Kerja Sama yang memuat jumlah daerah yang mereplikasi minimal 3 daerah.



Wilayah Bagian Timur



Jika dilihat dari sisi kualitatif berdasarkan pencapaian skor indikator untuk daerah-daerah di wilayah bagian timur, secara umum dapat dilihat bahwa semakin tinggi persentase pencapaian skor, maka semakin tinggi juga persentase pengisian parameter 3 pada tiap indikator Satuan Inovasi Daerah, begitupun sebaliknya. Untuk daerah pada wilayah bagian timur, dapat diketahui bahwa indikator-indikator yang memiliki persentase pencapaian skor yang relatif rendah yaitu indikator bimtek inovasi, monitoring dan evaluasi inovasi

daerah, dan replikasi.

Indikator dengan persentase pencapaian skor tertinggi adalah indikator kualitas inovasi daerah yaitu sebesar 92,13% atau dapat dikatakan bahwa sebesar 58,37% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian timur ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* yang berupa video inovasi yang memuat lima (5) unsur substansi yaitu latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak inovasi. Sedangkan indikator dengan

persentase pencapaian skor terendah adalah indikator bimtek inovasi yaitu sebesar 52,41% atau dapat dikatakan bahwa hanya sebesar 26,64% inovasi yang dilaporkan oleh daerah pada wilayah bagian timur ini telah terdapat data pendukung atau *evidence* berupa SK/ST, daftar hadir, atau undangan terkait bimtek inovasi yang dimaksud sejumlah minimal 2 kali pelaksanaan bimtek dalam 2 tahun terakhir.

Indikator	Wilayah Barat		Wilayah Tengah		Wilayah Timur	
	Mean Score	%Pencapaian Skor	Mean Score	%Pencapaian Skor	Mean Score	%Pencapaian Skor
Bimtek Inovasi	3,33	55,55%	3,21	53,47%	3,14	52,41%
Dukungan Anggaran	10,69	89,10%	10,19	84,88%	9,75	81,24%
Jejaring Inovasi	2,20	73,44%	2,31	76,88%	2,32	77,49%
Kecepatan Inovasi	7,35	81,71%	7,23	80,31%	7,96	88,47%
Kemanfaatan Inovasi	11,87	79,15%	11,51	76,76%	10,10	67,31%
Kemudahan Informasi Layanan	4,42	73,62%	4,46	74,32%	4,35	72,56%
Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	4,53	75,54%	4,29	71,46%	4,68	77,97%
Keterlibatan aktor inovasi	2,29	76,37%	2,35	78,22%	2,35	78,29%
Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	3,76	62,60%	3,83	63,88%	3,58	59,68%
Kualitas Inovasi Daerah	13,40	89,36%	13,58	90,55%	13,82	92,13%
Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	5,11	56,74%	5,10	56,63%	4,88	54,25%
Online Sistem	3,78	62,93%	3,88	64,72%	3,72	62,00%
Pedoman Teknis	3,86	64,28%	3,68	61,40%	3,39	56,52%
Pelaksana Inovasi Daerah	4,22	70,35%	4,25	70,88%	4,59	76,53%
Penggunaan IT	4,66	77,67%	4,48	74,70%	4,51	75,22%
Penyelesaian Layanan Pengaduan	4,69	78,18%	4,52	75,39%	4,36	72,73%
Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	4,79	79,84%	4,41	73,57%	4,49	74,79%
Regulasi Inovasi Daerah	6,90	57,47%	6,64	55,34%	7,58	63,15%
Replikasi	3,35	55,85%	3,18	53,06%	3,19	53,17%
Sosialisasi Inovasi Daerah	4,76	79,41%	4,57	76,13%	3,98	66,27%

Berdasarkan perbandingan persentase pencapaian skor indikator antar wilayah, diperoleh hasil bahwa terdapat tiga (3) indikator yang memiliki persentase pencapaian skor indikator yang relatif rendah yaitu indikator bimtek inovasi, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, serta replikasi. Hasil analisis deskriptif ini dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi para *stakeholder* dalam menemukan solusi atas persoalan atau kendala yang dihadapi daerah dalam pelaporan data inovasi daerah terkait kelengkapan data pendukung atau *evidence* pada masing-masing indikator Satuan Inovasi Daerah.

... wisata

sejenak nikmat

NUSA PENIDA

Teks Aji Foto Aji





Tak pernah habis rasanya bila kita membicarakan keindahan Pulau Bali. Destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut kini mulai bangkit setelah sempat tepuruk imbas pandemi Covid-19. Kembali, Tim Media Kebijakan berkesempatan mengunjunginya. Namun kali ini, Tim ingin merasakan nuansa berbeda, jauh dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Tepatnya, kami akan menyambangi Pulau Nusa Penida.

Nusa Penida sendiri terletak di Selatan Pulau Bali. Bila ingin menuju ke sana, kita hanya perlu mencari dermaga terdekat, melalui Pantai Sanur misalnya. Perjalanan ke Pulau Nusa Penida hanya membutuhkan waktu 45 menit menggunakan fastboat. Beruntung Sepanjang perjalanan, ombak cukup tenang dan ditunjang dengan kapal yang memiliki fasilitas keamanan memadai. Sesampainya di dermaga tujuan, kami telah dijemput oleh golf car yang bergegas mengantar kami ke penginapan. Sejenak meletakkan barang bawaan, kami langsung kembali menyusuri jalan-jalan di Nusa Penida.

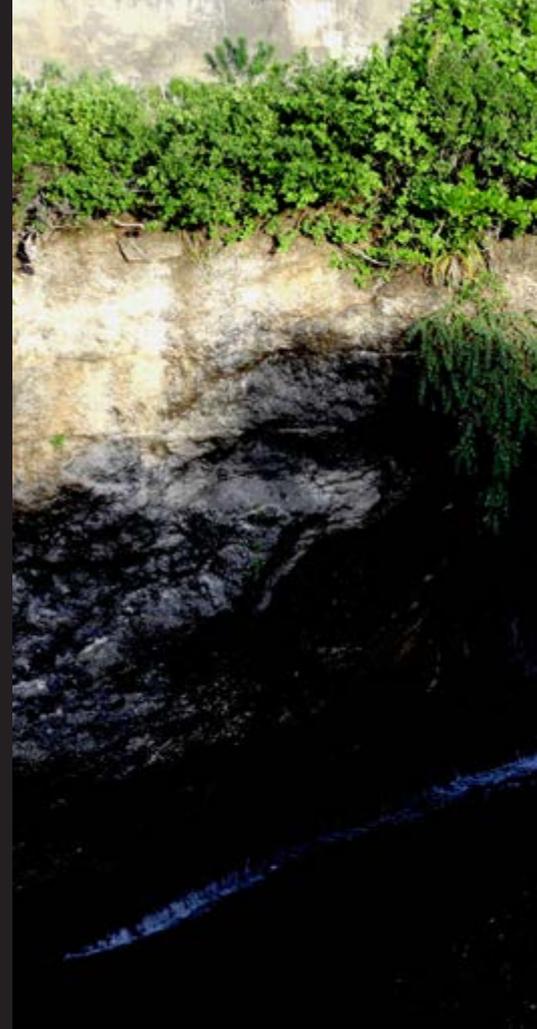
Pemandu wisata yang menemani kami menjelaskan bila lokasi wisata Nusa Penida terbagi menjadi 3 wilayah, yakni timur, barat, dan selatan. Ketika ia bertanya, mana dahulu yang akan disambangi, tentunya kami sepakat ke Kelingking Beach. Lokasi Kelingking Beach terletak di sisi barat pulau.

Tiba di Kelingking Beach, kami langsung dibuat terpana dengan lanskap indah yang ditawarkan. Seketika rasa lelah sewaktu di perjalanan langsung hilang. Kelingking beach menawarkan suguhan bukit yang berbentuk seperti jari kelingking dengan padu-padan birunya air laut membuat lokasi ini sangat instagramable. Tak heran, lokasi ini begitu sering berseliweran di beranda media social para *influencer*.

Sekitar setengah jam berfoto ria di sana, kami segera bergegas menyudahi kunjungan di Kelingking Beach. Bukan karena tak betah, kami berkejaran dengan waktu. Hal ini sebab Nusa Penida tidak akan bisa dinikmati bila hari sudah menjelang petang karena minimnya penerangan. Lantas, kami langsung diajak untuk mengunjungi pantai selanjutnya yaitu Angel's Billabong dan Broken Beach. Sama seperti Kelingking Beach, dua destinasi tersebut menawarkan lanskap yang tak kalah indah yang dapat kita nikmati dari atas bukit. Dua destinasi tersebut hanya terpaut kurang lebih 100 meter sehingga kami cukup menyusuri jalan setapak berbukitan yang menyejukan.

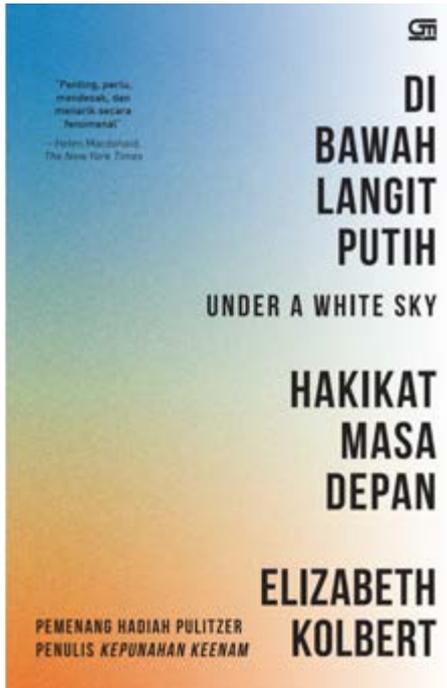
Angel's Billabong adalah sebutan untuk sebuah "kolam" alam yang terbuat di antara batu karang, dengan warna air yang sangat jernih dan membiru saat memantulkan sinar matahari. Dari atas bukit, angin laut menerpa sayup-sayup. Di depan kami terhampar pemandangan lanskap unik yang belum pernah kami saksikan sebelumnya. Benar-benar lukisan alam yang sangat menenangkan hati. Suasana juga terlihat asri dan cukup tenang karena tidak banyak aktivitas warga selain penghuni alam dan sekitarnya. Di sini, kami seakan terhipnotis oleh suasana hingga tak terasa senja telah menyapa.

Cukup disayangkan memang. Waktu jualah yang memaksa kami untuk kembali ke penginapan. Nusa Penida dengan suasana asri dan ketenangan yang ditawarkan, sangat layak menjadi destinasi baru yang harus anda kunjungi ketika ke Bali.





Langit Putih Bukan Lagi Konotasi



Di Bawah Langit Putih: Hakikat Masa Depan

Penulis : Elizabeth Kolbert

Penerjemah : Zia Anshor

Penerbit : Gramedia Pustaka
Utama

Tahun Terbit & Cetakan: 2021

Jumlah halaman :

v + 218 halaman

ISBN : 978-602-06-5413-3

Oleh : Hari Taqwan Santoso

Di bawah langit putih” terdengar seperti frase yang digunakan untuk keperluan sastra. Sebab, adalah lazim diketahui bahwa langit “berwarna” biru dan bukan putih. Frase tersebut agaknya bersifat konotatif saja jika kita berada di tanah lapang dan mendongak ke kubah mahaluas di atas kepala kita. Jikapun langit berwarna putih, kita melihat, itu adalah karena awan yang sebentar lagi berlalu. Dan walaupun hitam, itu adalah karena malam yang akan berganti siang dalam beberapa jam. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang, yang telah dipenuhi oleh berbagai masalah lingkungan, frase itu telah mempunyai makna denotatif. Tidak lama lagi, jika manusia tidak segera sadar dan berbenah, memutihkan langit adalah satu-satunya pilihan yang kita punyai.

Buku berjudul Di Bawah Langit Putih ini adalah kisah tentang upaya ilmuwan-ilmuwan di berbagai belahan di dunia untuk menyelamatkan alam dari kerusakan yang tengah menggerus tanpa ampun. Elizabeth Kolbert menemui tentara yang bertugas menyeterumi ikan-ikan penyerbu, teknisi-teknisi yang membalik arah Sungai Mississippi, para biolog yang berupaya melestarikan ikan paling langka di dunia, para insinyur yang mengubah Karbon Dioksida menjadi batu, dan para peneliti terumbu karang yang mencoba mengembangkan karang super tahan panas yang dapat bertahan melawan proses pemutihan akibat menghangatnya air laut.

Kolbert memulai dari masalah lokal (di AS). Menyusutnya Plaquemines, suatu kawasan di ujung tenggara Negara Bagian Louisiana, berada di antara kasus yang dia selidiki. Kawasan tersebut terkenal sebagai wilayah dengan laju kehilangan lahan paling cepat di dunia (hal. 30). Louisiana telah menyusut sebanyak lima ribu kilometer persegi. Di Indonesia, itu seperti kehilangan Pulau Bali yang menyusut menjadi hanya sebesar DKI Jakarta!

Banyak faktor yang menyebabkan penyusutan lahan itu, namun faktor terbesar kiranya adalah pendirian tanggul di sepanjang Sungai Mississippi yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Tanggul tersebut awalnya digunakan untuk menahan banjir akibat luapan sungai, suatu proyek ambisius yang menuai cukup banyak keberhasilan tapi mengembalikan efek samping yang tidak dikehendaki. Sungai Mississippi juga mengalirkan material-material yang membentuk kawasan di ujung paling tenggara Louisiana. Jadi ketika sungainya ditangguli, pasokan material-material pembentuk daratan ikut terhenti. Karena endapan yang lebih muda mempunyai struktur yang lebih lemah, maka wilayah paling ujung sungai, yang berbatasan dengan Teluk Meksiko, tergerus dengan laju yang mengkhawatirkan. Di Louisiana bagian selatan, tidak sibuk lahir berarti sibuk sekarat (hlm. 33).

Kolbert lalu terbang ke Australia untuk menemui para ilmuwan yang berupaya melestarikan terumbu karang. Terumbu karang

dan alga yang tumbuh di permukaannya saling bergantung satu sama lain. Jika suhu air laut meningkat sampai titik kritis, maka alga menjadi terlalu aktif dan mulai mengeluarkan Oksigen dengan kadar berbahaya. Untuk melindungi diri, karang melepas alganya. Ini disebut proses pemutihan (bleaching) karena warna karang kemudian berubah menjadi putih. Pemutihan tidak membuat karang langsung mati. Jika suhu air laut turun ke nilai semula dengan segera, maka karang tersebut dapat menarik kembali alga yang dia butuhkan dan pulih. Namun jika tidak, karang akan mati kelaparan (hlm. 96). Untuk kasus Australia, gelombang panas yang bermula di Hawaii pada 2014 mencapai Karang Penghalang Besar (Great Barrier Reef) pada 2016. Tahun berikutnya, sebanyak sembilan puluh persen karang di sana terdampak dan setengahnya sudah mati. Karang Penghalang Besar sendiri bukanlah satu terumbu karang, melainkan ribuan terumbu karang yang membentang seluas tiga ratus lima puluh ribu kilometer persegi (hlm. 100). Itu sekitar tiga kali Pulau Jawa dan setengahnya sudah mati.

Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) berencana menggelontorkan sekurang-kurangnya 100 juta Dollar Australia untuk menanggulangi kerusakan ini. Penanggulangan meliputi penggunaan robot bawah air untuk menanam kembali terumbu karang pengganti, mengembangkan lapisan ultra-tipis pelindung karang, memompa air untuk menurunkan suhu lautan di sekitar karang, serta membuat awan lebih cerah. Memperbaiki seluruh terumbu karang di Karang Penghalang Besar itu tidak realistis karena ukurannya yang sangat masif, namun melakukan sesuatu -mempertahankan apa yang masih ada jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.

Kerusakan alam benar-benar sedang terjadi dan ironinya, kita berada di pusat kerusakan itu dengan segala

aktivitas kita yang pantang tengok kanan-kiri. Manusia mengonsumsi bahan bakar fosil yang melepas Karbon Dioksida ke udara. Digabung dengan gas-gas berbahaya lain, jumlahnya sekarang mencapai 51 miliar ton pertahun. Karbon Dioksida adalah termasuk gas rumah kaca, yang efeknya menjebak panas di permukaan bumi, dengan kata lain membuat bumi lebih hangat. Meski sampai saat ini kenaikan suhu yang diakibatkan “hanya” 1 derajat Celcius lebih sedikit, tapi itu sudah cukup untuk membuat cuaca menjadi tidak menentu. Rangkaannya bisa ditarik ke arah gagal panen, matinya terumbu karang, melelehnya es kutub dan lebih seringnya bencana seperti badai terjadi.

Lebih parah lagi, Karbon Dioksida yang sudah kita lepas ke udara akan terus bertahan di sana selama beberapa dasawarsa sehingga suhu bumi akan terus meningkat. Jadi untuk menanggulangi bencana iklim yang telah berada di pelupuk mata kita tidak cukup hanya dengan mengurangi emisinya, tapi gas yang sudah ada di udara, entah menggunakan metode yang mana, juga harus disedot. Inipun masih tidak cukup. Suhu bumi masih perlu didinginkan untuk mengimbangi kenaikan yang sudah ada. Sebagaimana disampaikan Kolbert (hlm. 169), seorang

tikel-partikel padat, dalam hal ini debu intan) dalam jumlah tertentu ke stratosfer. Meski sangat mahal, debu intan tidak menyerap energi apa pun serta tidak reaktif. Kepulan debu intan di stratosfer akan menahan sebagian panas matahari agar tidak sampai ke permukaan bumi. Efek sampingnya, jika benar-benar dilakukan, matahari akan tampak meredup dan langit berubah putih sementara kita berada di bawahnya, di bawah langit putih.



Elizabeth Kolbert
Penulis Buku
Dibawah Langit Putih:
Hakikat Masa Depan

FATHER STU

Stuart menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai petinju di Helena, Montana, salah satu negara bagian Amerika Serikat. 14 Kemenangan dan 2 kali menerima kekalahan cukup membawanya menjadi petinju kelas menengah terkenal di wilayah tersebut. Muka lebam dan darah yang loncat dari mulutnya ketika beraksi di atas ring, tidak menyurutkan pukulannya.

Hingga dokter mengatakan ia tidak bisa lagi bertanding. Lebih tepatnya, tubuhnya tidak mengizinkan ia untuk berlaga lagi. Infeksi tulang rahang dan peradangan pada aliran darah, hingga demam yang dideritanya akibat penyakit tersebut memperingatkannya untuk selesai. Ia mesti mencari profesi lain.

Stuart mendampik vonis dokter. Setelah debat kecil di

ruang perawatan, dokter menyerahkan keputusan kepadanya. Ia cukup panik dengan kenyataan itu. Ibunya yang ikut mendengar, juga tidak dapat menyembunyikan kecemasannya. Stuart berpikir, apa yang bisa ia lakukan selain bertinju. Ibunya memberi informasi bahwa bekerja di pabrik akan membuat hidupnya lebih stabil. Stuart tidak ingin menghabiskan hidup sebagai buruh. Tapi apa?

Jawaban tidak muncul seketika. Rasa frustrasi diluapkannya dengan mabuk dan menceracau di jalanan. Hingga ia ditangkap polisi, bukan sekali. Ibunya selalu muncul sebagai penjamin. Pada penjemputan yang ketujuh kalinya, Stuart berkata pada ibunya, bahwa ia sudah tahu pekerjaan apa yang akan ia lakukan berikutnya.



HER STH



Ilustrasi Google

“Aku akan jadi aktor,” ucapnya yakin.

“Astaga,” ibunya tidak menyangka akan muncul ide itu.

“Aku dilahirkan untuk tampil. Hanya butuh waktu untuk menemukan panggung baruku,” ucapnya lagi.

Bukan Stuart kalau tidak keras dengan apa yang diyakininya. Ibunya tidak dapat menolak keinginan anaknya. Ia juga tampak tidak ahli dalam hal itu. Dan tempat mana lagi yang akan dituju seorang calon aktor di Amerika Serikat kalau bukan ke tempat film-film besar dunia di produksi; Hollywood. Singkat cerita, berangkatlah ia kesana.

Berharap Jadi Aktor hingga Bertemu Seorang Perempuan

Apa yang akan dilakukan seorang yang bercita-cita menjadi aktor di Hollywood, tanpa kenalan sama sekali. Ya, Stuart mengalami hal yang sama. Meskipun dengan wajah yang menarik, tubuh yang kekar, kepercayaan diri yang tinggi, ia mesti memulainya dari nol. Di antara sedikit peluang yang dapat diambilnya, ia memilih untuk menjadi pelayan toko roti, sambil bertanya ke para pelanggan, “apakah kamu punya kenalan di industri film.”

Cara itu seperti yang sudah diperkirakan; gagal. Tak satupun dari para pelanggan itu yang membawanya ke depan camera. Ia juga berulang kali mengikuti seleksi pencarian bakat. Gagal dan dikerjai sudah menjadi hal lumrah dari perjalanannya. Jiwa petarung tampak tak pudar dalam dirinya, meskipun tidak lagi menjadi petinju.

Di antara sekian percobaan pukulan, tentu ada yang kena. Meskipun tidak telak. Meskipun hanya satu. Begitu juga percobaan menjadi aktor ini. Meskipun tidak mendapat peran penting dalam sorotan kamera. Meskipun hanya sekali dalam menit yang singkat. Ia berhasil masuk ke kotak televisi. Ia mengajari ibunya di kampung untuk melihat anaknya di televisi.



Ibunya gembira. Stuart muncul di televisi. Namun bukan dalam sebuah drama atau telenovela. Stuart muncul membawa sebuah sapu pel. Dengan kepercayaan tinggi yang biasa, Stuart katakan sapu itu istimewa. Ibunya melongo. Stuart tampil dalam sebuah iklan.

Tentu saja itu bukan peristiwa ganjil bagi seorang yang meniti jalan di industri televisi. Menjadi bintang iklan, meskipun iklan sapu pel, bukan sebuah kegagalan. Jika mengingat perjuangannya dari awal, tahap tersebut dapat disebut kemajuan yang lumayan pesat.

Tapi apakah semua orang yang bercita-cita menjadi aktor memang ditakdirkan menjadi aktor? Di sinilah pertanyaan penting untuk Stuart. Dengan kemauan yang keras, tentu ia akan menjawab Tuhan tidak dapat menghalanginya. Ia tampak siap melayangkan pukulan pada siapa saja yang mempermainkan cita-citanya.

Namun Tuhan memiliki skenario yang berbeda dengan skema harapan Stuart. Di sinilah titik balik kisah ini. Seorang wanita mengalihkan pandangannya ketika ia tengah melayani seorang pembeli. Di toko roti tempatnya bekerja, ia mulai menapak jalan tuhan yang membimbingnya ke suatu tempat.

Ia tertarik dengan perempuan tersebut, seperti ketertarikannya para peran. Ia mencari informasi tentang si wanita dan mendapatinya sebagai seorang aktivis gereja yang taat. Perjalanan hidup Stuart sudah menggambarkan bahwa ia bukanlah hamba yang taat. Dalam banyak pembicaraan ia bahkan mengejek Tuhan.

Tuhan mengalahkan Stuart dengan cinta lewat perempuan ini. Carmen namanya. Carmen mengatakan, ia tidak bisa menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak beragama dengan taat. Alasan itu tampak kecil bagi Stuart. Singkat cerita, pria ugal-ugalan tersebut bersedia dibaptis dan membantu aktivitas Carmen di Gereja, juga sebagai seorang guru yang mengajari anak-anak di sekolah.

Jalan Tuhan yang Tak Disangka

Kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan Sang Pencipta. Film ini mengajari hal itu. Berangkat dari kisah nyata, film ini dirilis. Stuart bukanlah tokoh fiktif. Ia benar-benar ada dan pernah hidup di belahan bumi sana dengan perjalanan hidup dan bimbingan Tuhannya. Siapa yang menyangka Hollywood adalah rumah Tuhan bagi dirinya yang brutal.

Kisah ini belum berakhir. Justru akan memasuki babak pentingnya. Sepulangnya dari sebuah bar, tempat ia biasa menghabiskan malam, ia mengalami kecelakaan hebat. Ia sudah diperingatkan untuk tidak pulang dalam keadaan mabuk. Namun sifat bandel tetap menggerakkan badannya untuk menarik gas. Karena menghindari pengguna jalan yang juga ugalan, ia khilaf melihat lampu tanda berhenti, dan terjadilah apa yang tidak diharapkannya. Tabrakan mementalkan badan hingga membuat kepalanya hampir pecah.

Ia koma, tidak sadarkan diri. Namun ketidaksadaran itu membawanya pada yang pengalaman yang sublim. Ia melihat sosok perempuan yang akan membimbingnya. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tapi itu benar-benar jelas dalam pandangannya.

Singkat cerita, ia sampai di rumah sakit. Ibunya datang. Carmen, kekasihnya, juga. Nama yang terakhir membimbingnya dengan Al-kitab. Ia yang koma, sadarkan diri. Dan cerita selanjutnya adalah proses terapi. Namun bayangan perempuan yang membimbingnya tersebut tidak dapat dilupakan. Ia paham, Bunda Maria telah menyelamatkan dan memberi kesempatan hidup sekali lagi. Ia melihat itu adalah pesan Tuhan.

Kesempatan hidup sekali lagi itu dimanfaatkan Stuart untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia menyampaikan itu pada Carmen. Ia juga menyampaikan itu pada ibu dan ayahnya. Mereka semua mengatakan Stuart terlalu menghukum dirinya. Menjadi pendeta bukan kewajiban, mereka mengatakan Stuart berlebihan, mengambil pilihan ekstrem.

Di antara yang paling sedih adalah Carmen. Menjadi pendeta artinya berselibat. Stuart menghancurkan mimpi Carmen yang ingin dinikahi. Tapi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Bukan Stuart kalau tidak kukuh dengan keinginannya. Ia mendaftar menjadi calon pendeta.

Dewan gereja tentu saja tidak dapat langsung menerimanya. Tapi semua alasan dewan dibantahnya. Ia bahkan tidak masalah tidak mendapatkan rekomendasi dewan yang

berarti ia akan membiayai sendiri pelatihan kepastoran. Maka bergabunglah ia dengan para calon pendeta lainnya.

Ternyata menapaki jalan Tuhan tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Dalam proses pendidikan, ia mendapati dirinya lumpuh. Dokter menyatakan ia mengidap penyakit yang akan melumpuhkan ototnya secara bertahap. Tidak ada obat untuk penyakit tersebut, namun perkembangan penyakit pada setiap orang berbeda-beda.

Dari sini kesedihan dimulai. Tidak ada kesembuhan yang muncul sebagai mukjizat. Film ini tidak berakhir baik dalam pengertian umum. Hari-hari Stuart dipenuhi kekawatiran akan tubuhnya yang dapat berhenti berfungsi pada satu masa di depan. Tapi justru dari sanalah, ia memahami sisi lain rahmat Tuhan. Orang tuanya semakin dengan dengannya. Ia pun akhirnya didaulat menjadi pendeta.

Pendeta dengan pengalaman hidup yang panjang dan tidak mudah tentunya. Dari sana lahir khotbah-khotbahnya yang ditunggu para jemaat.



Menakar Prospek Pemerataan Ekonomi Pasca Pemekaran 3 Provinsi Baru Papua

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi Baru di Papua pada tanggal 30 Juni 2022. Ketiga RUU yang disahkan lewat Sidang Paripurna ke-26 masa Persidangan ke-V tahun Sidang 2021-2022, setelah sebelumnya digodok selama 2,5 bulan terhitung sejak rancangan aturan baru itu disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislasi (Baleg) pada 12 April 2022. Untuk selanjutnya dibahas oleh Komisi II DPR-RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Dengan disahkannya 3 RUU yang terdiri dari, RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah menjadi Undang-Undang. Maka saat ini pulau yang pada masa sebelum wangsa reformasi disebut Irian Jaya tersebut memiliki tambahan 3 Provinsi baru setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan demikian secara keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kini resmi memiliki total 37 provinsi.

Dalam ketiga Undang-Undang tersebut telah ditetapkan secara terperinci wilayah cakupan 3 provinsi baru paling muda di Indonesia ini. Provinsi Papua Selatan, sesuai hasil kesepakatan rapat di tingkat Panja dan Komisi II, beribukota di Merauke, dengan wilayah cakupan meliputi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digul. Provinsi Papua Tengah, Ibukotanya di Nabire dengan wilayah provinsi yang terbentang mulai dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deylai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, hingga Kabupaten Puncak Jaya.

Provinsi Papua Pegunungan Tengah, akan beribukota di Jayawijaya, dengan wilayah terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Gunung Bintang.

Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua

Pemekaran daerah di Papua tersebut berdasarkan amanat



Ferry Widiatmoko
Pengawas Pasar Modal OJK



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang pelaksanaannya mengacu pada Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Pemekaran daerah yang menghasilkan Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) setingkat Provinsi di Papua tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa bertujuan untuk mengangkat harkat martabat

Orang Asli Papua, mempercepat peningkatan pelayanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua dan pemerataan pembangunannya.

Semua hal ditataran praksisnya akan dilaksanakan secara simultan dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan unsur sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi Rakyat Papua.

Dari sejumlah tujuan pembentukan DOB di Papua yang kasat mata dan dapat dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan pemekaran daerah yang sempat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Papua ini, adalah dampak ekonomi bagi masyarakat di provinsi induk dan DOB hasil pemekaran. Diharapkan melalui langkah ini percepatan peningkatan pelayanan serta pemerataan pembangunan di Papua dapat menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan ujungnya akan menjadi salah satu unsur "Big Alpha" dalam meningkatkan harkat martabat Orang Asli Papua.

Dengan demikian, harapan dari diberlakukannya kebijakan pemekaran

daerah tersebut, akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua baik di provinsi induk maupun 3 provinsi hasil pemekarannya. Tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut bukan merupakan pekerjaan mudah.

Ketimpangan Ekonomi

Apabila kita mengacu pada pemekaran daerah yang pertama dilakukan di Papua pada tahun 2007 lalu, yang melahirkan Provinsi baru yakni Papua Barat. Setelah 12 tahun berlalu, merujuk pada data hasil Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas-BPS) tahun 2020 masih banyak masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat yang terbelenggu oleh kemiskinan yang multidimensional.

Menurut, Susenas BPS tingkat kemiskinan yang dialami oleh kedua provinsi hasil pemekaran pertama di wilayah Papua pada tahun 2019 masih sangat parah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sebesar 26,55 persen sementara di Papua Barat 21,51 persen, jauh diatas rata-rata persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 9,22 persen. Tingginya angka kemiskinan di kedua Provinsi tersebut, menurut informasi Kementerian Keuangan terjadi karena pada tahun 2019 terjadi lonjakan inflasi yang cukup tajam, penurunan penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan adanya keterlambatan suplai stok kebutuhan pokok.

Apalagi kemudian ditambah dengan eksekusi dalam proses pembangunan yang kerap menimbulkan ketimpangan ekonomi. Terdapat sejumlah faktor yang dapat memicu ketimpangan ekonomi di daerah. Antara lain karena adanya perbedaan sumber daya alam, faktor demografis, termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta mobilitas barang dan jasa.

Dan ketimpangan di Papua masih sangat tinggi disparitasnya, hingga saat menjelang pemekaran daerah di Papua jilid ke II kemarin. Merujuk data BPS tanpa memperhitungkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertambangan, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2021 mencapai Rp.100,63 juta per kapita per tahun, paling tinggi dibandingkan Kabupaten lain di seluruh wilayah Papua.

Sementara itu, mayoritas Kabupaten lain di Provinsi induk Papua pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah rata-rata nasional, yakni kurang dari Rp.62,2 juta per kapita per tahun. Bahkan di sejumlah Kabupaten seperti Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Dogiyai, Yahukimo pendapatan per kapita per tahunnya di bawah Rp. 8 juta, jadi rata-rata pendapatan mereka per kapita per bulan berkisar Rp. 650 ribu saja. Dengan demikian porsinya hanya sekitar kurang dari 6 persen dibandingkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Jayapura.

Tingginya ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah Provinsi Papua mengindikasikan adanya pembangunan ekonomi yang belum merata. Ketimpangan pendapatan ini bisa berpotensi menjadi kendala pemekaran daerah, tetapi pada saat bersamaan juga menjadi alasan untuk menyegerakan pemekaran daerah, karena dalam konteks wilayah Papua untuk mengentaskan permasalahan ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut harus dilakukan dengan cara multidimensional.

Adapun proses pembangunan multidimensional tersebut perlu memperhatikan segala aspek mulai dari kesejahteraan masyarakat, layanan pemerintahan, serta dapat memberikan dampak positif dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang berlimpah di wilayahnya. Untuk menekan ketimpangan di wilayah Papua ke arah pemerataan ekonomi

dengan cara memaksimalkan potensi ekonomi antar wilayah di masing-masing provinsi yang memiliki nilai unggul kompetitif. Semua proses pemerataan ketimpangan ekonomi tersebut, jika merujuk pada tujuan pembentukan DOB dalam kaitannya dengan pemekaran daerah di Papua untuk melandaikan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Papua.

Pertanyaannya kemudian apakah tujuan pemekaran daerah itu linier dengan melandaikan ketimpangan ekonomi di daerah yang telah dimekarkan?

Jika mengacu pada kasus pemekaran daerah yang telah dilakukan di Papua, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang melakukan analisis disparitas pendapatan per kapita di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rentang waktu 2013-2019 atau 6 tahun hingga 12 tahun pasca pemekaran dilaksanakan, dengan menggunakan Indeks Williamson, hasilnya menunjukkan ketimpangannya masih sangat tinggi di atas angka 0,5, yang

dalam indeks tersebut merupakan batas atas, untuk Provinsi Papua disparitasnya ada di angka 2,02 sementara Papua Barat 1,51.

Artinya setelah 12 tahun pemekaran dilakukan di wilayah Papua ketimpangan pendapatan masih saja terjadi. Apakah dengan demikian pemekaran daerah di Papua dalam kesempatan pertama itu gagal? Perlu pengkajian lebih lanjut untuk memastikannya. Karena

kegagalan atau keberhasilan pemekaran daerah itu tak hanya ditinjau dari satu faktor saja, terdapat beberapa faktor yang berkelindan di dalamnya.

Dengan fakta hasil analisa tersebut berarti prospek akan melandaikan ketimpangan di wilayah Papua setelah terbagi menjadi 5 Provinsi agak berat untuk tercapai. Untuk mengetahuinya penelitian harus dilakukan ketika proses pemekaran daerah di Papua itu sudah selesai dan telah berjalan beberapa tahun ke depan, yang perlu dilakukan agar pemekaran daerah di Papua bisa berjalan sesuai harapan

adalah melalui penguatan koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi yang baru terbentuk, selain itu peran serta Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan lembaga dibutuhkan untuk memajukan daerah tertinggal seperti Papua, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun konektivitas antar wilayah di provinsi-provinsi yang baru dibentuk tersebut.

Pemekaran wilayah Papua Jilid II ini memang sudah sepatutnya dilakukan mengingat cakupan wilayahnya yang sangat luas, dengan landscape yang sangat variatif bergunung-gunung sehingga akses untuk melakukan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik menjadi lebih rumit. Harapannya, meskipun tak mudah, pemekaran daerah di Papua menjadi 5 DOB setingkat provinsi akan mampu mengurangi disparitas pendapatan perkapita di wilayah Papua.



Membaca Opini Publik Melalui Sosial Media Analytic

Pada bulan Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). IKN yang baru ini akan menjadi lokasi pusat pemerintahan yang saat ini berada di DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dari ibu kota yang lebih merepresentasikan identitas bangsa, peningkatan efektivitas pemerintahan pusat, dan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan IKN diperkirakan akan memerlukan anggaran hingga 500 Triliun Rupiah dan memerlukan waktu penyelesaian hingga tahun 2045. Menurut UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemindahan IKN akan dilakukan dengan 5 tahap mulai tahun 2022 hingga tahun 2045 dengan menggunakan pembiayaan yang berasal APBN dan pembiayaan non APBN seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBUS), investasi BUMN dan sektor swasta, maupun pendanaan internasional. Pendanaan APBN akan difokuskan pada infrastruktur dasar dan kompleks pemerintahan utama, sedangkan pembiayaan non APBN dapat membiayai sektor pendukung sehingga beban APBN dapat dikurangi.

Dengan begitu masifnya anggaran yang diperlukan, kompleksitas yang sangat tinggi, serta waktu penyelesaian dalam jangka waktu yang cukup lama, pemindahan IKN menjadi isu nasional yang banyak dibicarakan oleh publik di berbagai platform baik digital maupun konvensional. Salah satu platform yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu IKN adalah media sosial Twitter. Twitter menjadi salah satu platform media sosial yang sering digunakan karena tampilan yang menarik dalam menampilkan percakapan serta kemudahan akses penggunaannya. Pengguna Twitter dapat mengirimkan tweet berupa teks yang dapat di posting ulang maupun ditanggapi oleh pengguna lainnya. Tweet tersebut sering berupa opini pribadi yang akan menjadi sebuah diskusi jika ditanggapi oleh pengguna lainnya. Saat ini, twitter mempunyai API publik yang dapat digunakan untuk menangkap percakapan yang dapat digunakan untuk mengetahui opini publik mengenai isu pemindahan IKN.

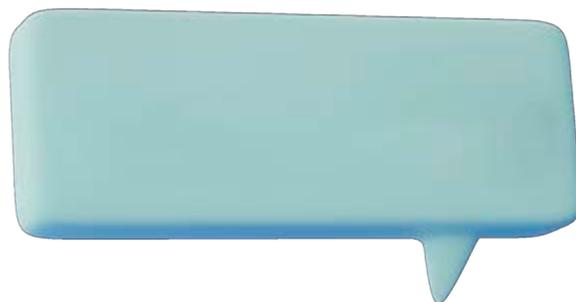
Tiga tahun berselang sejak pengumuman pemindahan IKN digulirkan dari tahun 2018, isu mengenai IKN tetap menjadi isu



Alfian Pamungkas, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama



Naomi Ratna Sari, S.Si.
Statistisi Ahli Pertama



Bapak dan Tengkulak

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Pada sebuah Sabtu yang kelabu, Bapak mengajakku ke rumah seorang tengkulak. Bu Sarmi namanya. Aku setuju. Dua raga pun melaju, melalui jalan-jalan desa, menghilang di tikungan dan melintasi punggung jembatan tua, sebelum sampai ke tujuan.

Bapak menyalakan rokok segera setelah kaki-kaki telanjangnya menapak tanah. Aku memasang standar, lalu turut turun dari jok dan halaman Bu Sarmi pun terbentang di hadapanku. Di seberangnya, rumah model lama sedang direnovasi, diperluas ke belakang. Kabarnya, renovasi itu baru tahap pertama. Setelah selesai, teras dan ruang tamunya akan dirombak total. Genteng-genteng rapuh berlumut di atas akan dirontokkan dan diganti dengan yang lebih baru, lebih kokoh dan bermerk. Kayu-kayu jati penyangga atapnya, yang sebenarnya belum lapuk juga, akan diganti beton-beton tinggi berukir, seperti kuil para dewa Yunani Kuno yang arsitekturnya mulai populer digunakan untuk rancangan rumah orang-orang kaya. Melihat pembangunan itu, bapak menggelengkan kepala kagum.

Sementara itu, Bu Sarmi sudah terlibat percakapan serius dengan seorang petani desa yang tidak kukenal. Dua orang petani lain duduk di samping petani pertama, menunggu giliran diajak bicara. Satu orang lagi berdiri. Nah, kalau yang terakhir ini aku kenal karena dia adalah tetanggaku sendiri. Melihat kedatangan kami, dia langsung menghampiri dan menegur bapak.

“Jagung, Pak Ri?” tanya orang itu. Dia mendekat ke arah kami, melangkah keluar dari bayang-bayang atap rumah. Wajahnya segera terbasuh oleh semburat jingga.

“Iya, Pak Sapuan. Sampeyan?”

“Saya gabah.”

“Dengar-dengar, di sini jagung basah 37,” kata bapak. Maksudnya, Bu Sarmi berani membeli jagung dari petani yang langsung dari sawah, tanpa proses pengeringan terlebih dahulu, 3.700 rupiah per kg. Untuk panen kali ini, diperkirakan bapak akan berhasil mengeruk 5 ton jagung dari sawah.

“Sampeyan betul. Itu... yang sedang berbincang dengan Bu Sarmi itu... juga sedang menjual jagung. Aku dengar obrolan mereka dari awal. Memang 37.” Pak Sapuan maju selangkah supaya lebih dekat ke dengan kami, lalu menambahkan dengan berbisik. “Tapi saya tahu ada tengkulak yang berani beli 38.”

“Iya ta?” Bapak sedikit terkejut. “Siapa Pak?”

“Ssst... jangan keras-keras Pak. Tidak enak kalau nanti Bu Sarmi dengar.”

“Oh, baik, baik.” Meski suara bapak berubah lirih, tapi terdengar antusias. Selisih seratus rupiah saja per kg berarti selisih seratus ribu per tonnya. Dan itu banyak.

Pak Sapuan melanjutkan, “Coba sampeyan ke Desa Wonokromo...”

“Ah, yang mana orangnya?” begitu mendengar nama desa itu disebutkan, bapak buru-buru memotong. Rasa-rasanya dia kenal banyak orang dari sana, tapi belum pernah mendengar ada tengkulak palawija yang berani menghargai panen lebih dari Bu Sarmi.

“Hm... Balai Desa, Pak. Di sampingnya ada gang yang hanya muat untuk satu mobil saja. Nah, sampeyan masuk. Rumahnya di situ.”

“Yang temboknya bercat oranye itu?”

“Nah itu sampeyan tahu.”

“Oh ho ho! Saya pernah beli kambing dari tetangga sebelahnya. Dari jalan sampai ujung gang itu cuma satu rumah yang cocok untuk tengkulak, besar dan halamannya luas. Jadi saya anggap saja itu rumahnya. Tapi kok saya baru tahu penghuninya jadi tengkulak palawija...”

“Saya juga, Pak. Mungkin dia tengkulak baru. Dan karena itulah dia berani beli dengan harga lebih tinggi. Supaya para petani seperti kita ini menjual panen ke dia. Biasa... cari pelanggan. Saya kurang tahu ini. Tapi, soal harga jagung yang tadi saya sampaikan itu sudah jelas, tidak meleset. Sebab saya sudah ke sana kemarin sore. Dan memang dia berani 38. Wong saya lihat sendiri ada yang jual jagung ke dia.”

“Tapi kalau dia memang berani beli lebih tinggi, kok sampeyan masih ke sini?”

“Oh! Itu... Nganu... Saya mengantar gabah saja. Uangnya sudah saya ambil bulan lalu. Sampeyan seperti tidak tahu saja. Ha ha ha...” Aku Pak Sapuan malu-malu.

Berhutang sejumlah uang ke tengkulak untuk kemudian dibayar dengan hasil panen adalah praktik yang biasa di kalangan petani desaku. Bapak pun sering melakukannya. Karena ingat pada dirinya sendiri, ketika benar-benar tidak punya uang sampai harus berhutang ke tengkulak itulah, dia tersenyum.

“Apa Pak Sapuan kenal baik tengkulak dari Wonokromo itu?” aku ikut nimbrung pembicaraan mereka.

“Tidak juga.”

“Kalau nomer hp-nya, ada?” desakku. Sama seperti bapak, aku berubah antusias begitu menyadari adanya selisih seribu rupiah per kg. Seolah-olah uang itu sudah berada di depanku dan hanya butuh beberapa langkah untuk benar-benar mengambalnya.

“Tidak, Dik.”

“Baiklah kalau begitu.” Bapak meletakkan tangannya di bahu. Aku lalu kembali diam.

Tiba-tiba Bu Sarmi menegur, “Pak Sapuan atau Pak Ri?”

Menanggapi teguran tersebut bapak mengacungkan lengannya, memberi jalan. Pak Sapuan berkata, “Saya dulu, Bu.”

Kami terlalu asyik bercakap-cakap sampai tidak sadar kedua petani yang tadi duduk di teras Bu Sarmi sudah pergi. Kami bertiga pun berjalan mengarungi halaman rumah si tengkulak palawija, masuk ke dalam bayang-bayang terasnya yang teduh. Kulihat telapak tanganku, kulitnya mengerut karena dingin, juga basah oleh embun. Sementara bapak biasa saja. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian yang tebal. Kukira, usianya sudah cukup untuk membuat kulit rentannya beradaptasi dengan hawa dingin pedesaan. Tapi itu juga bisa karena hangatnya asap rokok yang dia hirup. Asap itu mula-mula mengumpulkan panas di dada, lalu pelan-pelan menjalar ke seluruh tubuhnya.

Pak Sapuan tidak berbicara banyak dengan Bu Sarmi, sebab dia datang hanya untuk membayar hutang. Tidak ada tawar-menawar yang alot dalam pembicaraan itu. Karenanya, dia segera hengkang dan giliran kami pun tiba. Selagi bapak maju ke hadapan Bu Sarmi, aku melihat-lihat sekeliling, menatap setiap pernak-pernik rumah yang dia peroleh dari hasil berdagang palawija. Bu Sarmi mempunyai satu unit truk dan satu unit mobil pick up yang biasa dia gunakan untuk mengangkut palawija, satu unit mobil pribadi dan 3 unit sepeda motor.

Deru mesin diesel mulai terdengar. Sumbernya berasal dari penggilingan dalam bangunan yang mirip gudang besar di sebelah rumah. Itu milik Bu Sarmi juga.

“Jagung basah di sini 37, Bu?”

“Iya, Pak Ri. Tapi lihat jagungnya dulu. Kalau jagungnya banyak yang bolong, ya tidak bisa 37.”

“Kalau jagungnya bagus berarti lebih dari 37, ta?” tanya Bapak setengah bercanda. Dia tahu, itu tidak berlaku.

“Ah, sampeyan ini bisa saja, Pak Ri. Omong-omong, jagung dari sawah yang mana?”

“Sawah yang di dekat rumah itu.”

“Ooo... Tahu. Saya kemarin lewat sana. Di persawahan yang itu memang bagus-bagus jagungnya,” puji Bu Sarmi.

“Jadi, 37 lebih?” Mereka berdua pun tertawa bersama seperti teman akrab. Tak berselang lama, bapak kemudian pamit.

Ketika roda-roda motorku meninggalkan rumah si tengkulak, dari atas jok aku bertanya, “Sekarang kita ke Wonokromo, Pak?”

“Lha ngapain?”

“Ke rumah tengkulak yang diceritakan Pak Sapuan tadi ta?”

“Tidak. Bapak tidak ada niatan menjual jagung ke sana. Tadi bapak pura-pura antusias saja. Supaya Pak Sapuan tidak kecewa.”

“Lah, kenapa?”

“Bapak sudah ketemu satu pembeli, Bu Sarmi.”

“Tapi kan selisihnya lumayan, Pak?”

“Ya, tapi selisih itu tidak sebanding dengan hubungan antara bapak dengan Bu Sarmi. Selama ini kami menjalin hubungan dagang yang baik. Kalau tiba-tiba bapak menjual jagung ke tengkulak lain, apalagi setelah tanya-tanya harga ke Bu Sarmi hubungan itu akan terganggu. Berdagang itu bukan hanya soal uang, hubungan baik lebih penting. Dan lima ratus ribu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hubungan semacam itu.”

Aku tidak mau berdebat dengan bapak. Tapi toh, sambil melihat jalan desa yang aspalnya dipenuhi lubang itu, aku cemberut. Aku sangat tidak sepakat dengan pendapatnya. Menurutku, sampai kapan pun petani tidak boleh berkompromi dengan tengkulak. Petani yang demikian itu akan kehilangan martabat dalam berdagang sehingga menjadi bulan-bulanan. Petani seperti itu hanya akan berakhir dibodohi. Para tengkulak seenaq perutnya memainkan harga. Mereka menekan harga dari petani, lalu menjual dengan harga yang sudah dilambungkan terlebih dahulu. Kita seringkali mendengar berita tentang petani yang merugi karena harga panen ambruk, tapi tidak pernah mendengar berita tentang tengkulak yang rugi. Sekali pun tidak pernah.

Coba lihat Bu Sarmi. Hanya dengan bepergian kesana-kemari mengangkut palawija, dia sudah punya mobil, motor, gudang, dan sekarang ini hampir mempunyai rumah mewah bak dalam sinetron. Dia tidak butuh menanam, dia tidak peduli dengan harga pupuk, juga hama yang sekali merajalela panen lenyap seketika. Dia benar-benar hanya main angkut barang kesana-kemari dan hasilnya jauh lebih banyak dari bapak.

Sementara itu di sisi lain, bapak yang harus bekerja siang dan malam di sawah, tanpa peduli panas dan hujan, penghasilannya hanya segitu-segitu saja. Jangankan merombak rumah, memperbaiki genteng yang bocor saja harus menunggu panen karena dia tidak punya uang. Semua itu adalah karena bapak dengan tenangnya berkompromi dengan tengkulak.

call for PAPER

MATRA PEMBARUAN



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2022, yang akan diterbitkan pada 2 (dua) edisi yaitu Mei dan November.

Registrasi dan submit artikel anda di <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>
Jalan Kramat Raya No.132, Senen, Jakarta Pusat
0812 8165 6781/Shinta (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38000 s.d 40000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah Dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan
- Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.
- Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*).



Google Scholar

GARUDA
KARDA RIJUAN DIGITAL

Crossref

MORAREF

neliti

CALL FOR PAPER

JURNAL BINA PRAJA

Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.



JBP Journal of Home Affairs Governance

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

April, Agustus & Desember

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscript may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscript should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscript have not been published in other media
- Manuscript should have a minimum of 35000-38000 character in Indonesian or English
- For the writing systematic and format, see <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/authorGuidelines>
- A minimum of 25 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduated theses, and/or other research report
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



jurnal.kemendagri.go.id

For more details | 08812 1941 9885/redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

